



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

SEKOLAH POLISI NEGARA (SPN) PADANG BESI 1961-2002

SKRIPSI



**VITRY WIDYANINGSIH
07181035**

**JURUSAN ILMU SEJARAH
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012**

KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi 1961-2002"**. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Baginda Rasul, Nabi Muhammad SAW yang diutus Allah SWT untuk seluruh umat manusia.

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, khususnya Bapak Prof. Dr. Phil. Gusti Asnan, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Drs. Purwo Husodo M.Hum selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar dan ikhlas bersedia meluangkan waktu untuk memberikan sumbangan ilmu, bimbingan serta arahan yang sangat penulis harapkan dalam penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada Bapak Drs.Sabar, M.Hum selaku ketua jurusan dan Ibu Dra.Enimay, M.Si selaku Sekretaris Jurusan, serta kepada Bapak Drs.Sabar, M.Hum, selaku Pembimbing Akademik. Terima kasih kepada seluruh staf dan pengajar Jurusan Ilmu Sejarah, Prof. Dr. Phil. Gusti Asnan, Prof. Dr. Herwandi, Dr. Lindayanti, M.Hum, Drs.Sabar, M.Hum, Dra.Enimay, M.Si, Dr. Anatona, M.Hum, Drs. Zayardam, M.Hum, Drs.Syafrizal, M.Hum, Dra. Irianna, Witrianto, SS, M.Hum, M.Si, Drs. Zulqaiyim, M.Hum, Drs. Armansyah, Drs. Purwo Husodo M.Hum, Dr. Nopriyasman, M.Hum, Wannofri, M.Hum, Yenni Narni, S.S,

M.A, Hari Efendi, S.S, M.A, Drs. M. Djuir, dan Yudhi Andhoni, S.S, yang telah menuangkan ilmu ke dalam cawan penulis dengan penuh rela.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Dekan Fakultas Ilmu Budaya beserta jajaran. Terima kasih kepada personil polisi SPN Padang Besi yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terutama pada AKP Himsar Siregar, AKBP Ali Absar, Pak Slamet B.S, Pak Maat Achin yang selalu memberi bantuan kepada penulis selama melakukan penelitian di SPN. Dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Keberhasilan ini tidaklah penulis raih sendiri, melainkan atas dorongan dan pengorbanan orang-orang yang selalu mencintai penulis dengan tulus dan murni. Teruntuk Mami tercinta, Leni Suharti. Tiada kata-kata yang bisa diucapkan mewakili perasaan penulis. Terima kasih atas kesabaran menunggu anak mu ini menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih tak terhingga untuk Mami. Teruntuk papi, Nurmatias, darahmu mengalir dalam darahku. Terima kasih atas pengorbanan mu selama ini, yang mau menemani dan memberikan waktu kepada penulis dalam melakukan penelitian. Aku akan selalu berusaha mengukir senyum di wajahmu, Papi dan Mami. Izinkan ku persembahkan karya ini untuk mu.

Untuk seluruh keluarga besarku, terima kasih atas dukungan untukku. Buat Mbak Venny, adek2 ku Shelly, Sonia, Farhan yang telah mendukung dan memberi semangat ayuk selama menyelesaikan skripsi. Spesial buat Abi yang selalu setia

mendampingi dan menemani penulis dan tidak pernah henti-hentinya memberikan semangat membantu penulis disaat lelah dan letih dalam menyelesaikan karya ini

Kepada teman-teman dan para senior-seniorku Angkatan 2003, 2004, 2005, 2006 yang tidak mungkin untuk disebutkan satu persatu. Untuk seluruh teman-teman seperjuangan History angkatan 07, (Wiwit, Mira, Rita, Farhan, Ayu, Citra, Nora, Fitri, Dona, Tia, Andre, Donal, Ali, Sopan, Yogi, Devra, Ef, Aldi, Melati, Ade, Dani, Hilza, Vino, Rido, Yudi, Bang Codot, Fandi, Rio). Untuk Asri, kita mempunyai perasaan yang sama saat detik-detik menjelang kompre hingga sekarang, untuk Ci-Un semangat terus, tinggal beberapa langkah lagi, jangan sampai menyerah. sahabatQu tersayang Amelinda, yang selalu memberi support dan semangat kepada penulis, yang selalu menemani penulis kemanapun dan kapanpun, semangat ya cin,, Qta akan sukses sama-sama. 5 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk kita berbagi suka dan duka,,, *"Jaman yang benar-benar baik susah ditemukan, sulit ditinggalkan dan tidak mungkin untuk dilupakan."*

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dalam hal ini penulis mengharapkan saran-saran dan kritikan yang bersifat membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Terakhir, penulis berharap skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi yang membacanya. Wassalam.

Padang, 2012

Penulis

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi 1961-2002". Sekolah ini merupakan lembaga pendidikan yang bertujuan untuk mendidik dan membekali nilai-nilai idealisme serta patriotisme sehingga dapat menghasilkan anggota polisi yang berdisiplin dan bermoral. Batasan awal penulisan ini adalah tahun 1961 karena pada tahun ini merupakan awal didirikannya SPN Padang Besi. Batasan akhir yang diambil adalah tahun 2002 karena pada tahun ini polisi pisah dari TNI sehingga polisi bisa menjalankan kewenangannya sendiri, hal ini berpengaruh terhadap sistem pendidikan di SPN.

Sebagaimana lazimnya studi sejarah, maka penelitian ini menggunakan metode sejarah. Sebagai langkah awal dilakukan pengumpulan bahan sumber (heuristik). Dalam penelitian ini didapatkan berbagai jenis sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder. Dikarenakan penelitian ini bersifat sejarah kontemporer, maka sumber yang digunakan juga banyak berasal dari sumber wawancara karena kurangnya arsip yang ditemukan. Sumber lisan ini kemudian diperkuat dengan sumber tulisan, sehingga kedua sumber ini dapat saling melengkapi. Setelah sumber diperoleh, kemudian dilakukan kritik, baik kritik interen maupun kritik eksteren. Langkah berikutnya adalah melakukan interpretasi. Terakhir dilaksanakan tahap penulisan dalam bentuk skripsi ini.

Pada tahun 1961 SPN Padang Besi didirikan untuk mengisi kekosongan personil polisi yang sangat kurang di wilayah Sumatera Barat akibat pemberontakan PRRI. Dalam perjalanan sekolah ini terdiri dari tiga periode, yakni masa Orde Lama 1961-1966, Orde Baru 1966-1998, dan Reformasi 1998-2002. Dari penelitian ini terlihat perbedaan antara ketiga periode tersebut, diantaranya SPN pada masa Orde Lama dimana pendidikan polisi dipersiapkan untuk menjaga keamanan akibat pergolakan yang terjadi, sehingga dalam pendidikan hanya bersifat kepada tugas polisi umum. Pada masa Orde Baru polisi berada dibawah naungan TNI sehingga latihannya bersifat militeristik, latihan ini selain untuk melatih polisi dalam menjaga keamanan masyarakat juga dilatih untuk berperang, latihan yang keras ini berdampak terhadap sikap polisi yang arogansi dalam menghadapi masyarakat. Pada masa Reformasi polisi lebih dipersiapkan untuk menjadi polisi sipil yang bertugas melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat. Perbedaan lainnya terlihat pada kurikulum pendidikan dimana pada Orde Lama hanya mempelajari dasar prajurit, pada masa Orde Baru kurikulum lebih bersifat militer, sedangkan masa Reformasi kurikulumnya berubah menjadi polisi sipil.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR ISTILAH.....	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Kerangka Analisis.....	8
E. Metode Penulisan	12
F. Sistematika penulisan.....	13
BAB II. LATAR BELAKANG PENDIRIAN SEKOLAH POLISI NEGARA (SPN) Padang Besi	
A. Sejarah berdirinya Sekolah Polisi Negara (SPN) Nasional	15
B. Hubungan Pendirian Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi dengan Peristiwa Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).....	25
C. Pendirian Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi.....	29

BAB III. SEKOLAH POLISI NEGARA (SPN) PADANG BESI

A.SP.N Masa Orde Lama (1961-1966)	32
1.Ka SPN.....	34
2. Instruktur.....	36
3. Siswa dan Alumni.....	37
4. Kurikulum.....	40
5. Sarana, dan Prasarana di SPN Padang Besi.....	43
B.SP.N Masa Orde Baru (1966-1998)	45
1.Ka SPN.....	45
2. Instruktur.....	49
3. Siswa dan Alumni.....	51
4. Kurikulum.....	53
C.SP.N Masa Reformasi (1998-2002)	56
1.Ka SPN.....	56
2. Instruktur.....	57
3. Siswa dan Alumni.....	58
4. Kurikulum.....	61
D.Profil	64
BAB IV. KESIMPULAN.....	69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR INFORMAN

LAMPIRAN

DAFTAR ISTILAH

- Aksi Polisionil : Operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan tahun 1947 dan 1949.
- Bintara : Pangkat ketentaraan di bawah letnan dan di atas kopral seperti sersan, sersan mayor, dan pembantu letnan .
- Hibah : Pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan.
- Kode etik : Pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku.
- Komando : Satuan militer yang disiapkan dan diorganisasi sebagai pasukan gerak cepat, terutama untuk menyerang dan segera lari dari suatu serangan.
- Mengganyang : Menghancurkan; mengikis habis
- Organisasi : Wadah untuk sekelompok individu berinteraksi dalam wewenang tertentu.
- Organisatoris : Bersifat ahli dalam mengorganisasi
- Pemberontak : Orang yang melawan atau menentang kekuasaan
- Prajurit : Anggota angkatan darat dan udara
- Prasarana : Segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses
- Psicotest : Tes untuk mengukur aspek individu secara psikis.

- Reorganisasi** :Proses pembentukan norma/nilai baru agar terbentuk keserasian dalam tubuh organisasi yang telah mengalami perubahan
- Sarana** :Segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.
- Sertifikat** :Tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dr orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian
- Tamtama** :Prajurit yang di siapkan sebagai pelaksana suatu tugas tertentu,yang terampil mahir dan selalu siap menjalankan tugasnya, tanpa ada rasa ragu.
- Tanah Ulayat** :Tanah yang berada di nagari yang dikuasai dan diatur oleh hukum adat.
- Tribrata** :Tiga asas kewajiban Kepolisian Negara RI yang dilambangkan dengan bintang

DAFTAR SINGKATAN



ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AKBP	: Ajun Komisaris Besar Polisi
AKP	: Ajun Komisaris Polisi
AKPOL	: Akademi Polisi
APRI	: Angkatan Perang Republik Indonesia
BRIMOB	: Brigade Mobil
Bripka	: Brigadir Polisi Kepala
Brippol	: Brigadir Polisi
DEPLAT	: Depo Pendidikan dan Latihan
DODIKLAT	: Komando Pendidikan dan Latihan
HAM	: Hak Azazi Manusia
Ka Korsis	: Kepala Korp Siswa
Kapolres	: Kepala Kepolisian Resor
Kapolsek	: Kepala Kepolisian Sektor
Ka SPN	: Kepala Sekolah Polisi Negara
KAMTIBNAS	: Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
KAN	: Kerapatan Adat Nagari
KOBANGDILAT	: Komando Pengembangan Pendidikan dan Latihan
KODAM	: Komando Daerah Militer
KOPLAKRI	: Komando Pendidikan dan Latihan Kepolisian Republik Indonesia
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
Letkol Pol	: Letnan Kolonel Polisi



MABES	: Markas Besar
OPR	: Organisasi Pertahanan Rakyat
PBB	: Peraturan Baris-berbaris
PHH	: Pasukan Anti Huru Hara
PKI	: Partai Komunis Indonesia
POLDA	: Kepolisian Daerah
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
PRRI	: Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia
PTIK	: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian
SAK	: Sekolah Angkatan Kepolisian
SD	: Sekolah Dasar
SKCK	: Surat Keterangan Catatan Kepolisian
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SOB	: Staat van Oorlog en Beleg
SPN	: Sekolah Polisi Negara
SR	: Sekolah Rakyat
TNI-AD	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
TNI-AL	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
TNI-AU	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara
WNI	: Warga Negara Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencitraan anggota polisi di mata masyarakat saat ini sudah terlanjur buruk, hal ini disebabkan oleh perilaku sebagian anggota polisi itu yang tidak sesuai dengan kode etik kepolisian. Seharusnya aparat kepolisian menjalankan fungsi pemerintahan dengan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Kenyataannya yang dilihat sekarang malah sebaliknya, sebagian aparat kepolisian masih saja memperlihatkan sikap arogansinya terhadap masyarakat.

Tidak sedikit pula anggota polisi nakal yang terlibat masalah hukum seperti pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia), penggunaan kekerasan dalam penyidikan, persengkokolan polisi dengan penjahat dalam kasus-kasus kriminal, budaya korupsi, tindakan penyalahgunaan narkotika. Banyaknya bermunculan kasus hukum yang melibatkan anggota kepolisian membuat citra korps Bhayangkara menurun di kalangan masyarakat.

Benarkah perilaku anggota polri yang tidak sesuai dengan kode etik kepolisian berawal dari proses pendidikan yang mereka dapat melalui lembaga pendidikan kepolisian? Seharusnya pendidikan polisi melalui Sekolah Polisi Negara (SPN) bertujuan untuk mendidik, dan untuk mewujudkan sikap dasar kebhayangkaraan berawal dari pendidikan.

Proses pendidikan yang didapatkan calon anggota polri di Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi tidak terlepas dari perjalanan sejarah yang mewarnai

perkembangan pendidikan di SPN Padang Besi. Pendidikan yang didapat sejak awal pendirian SPN Padang Besi hingga sekarang sangat berbeda, hal ini disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Tahun 1960 jumlah anggota kepolisian khususnya di Propinsi Sumatera Barat sangat kurang, hal ini disebabkan oleh kondisi politik di Sumatera Barat yang masih kacau akibat terjadinya pemberontakan PRRI. Pemberontakan yang terjadi mengakibatkan dampak terhadap kurangnya aparat kepolisian dalam melaksanakan tugas menjaga kestabilan dan keamanan masyarakat.¹

Tanggal 30 Desember 1961, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kepala Kepolisian Negara No. Pol. :62/SK/MK/1961 didirikanlah SPN Cabang Padang Besi di Sumatera Barat yang secara administratif membawahi Kepala Polisi Komisariat Sumatera Barat dan secara teknis berada dibawah Komando Pendidikan dan Latihan Kepolisian Republik Indonesia (KOPLAKRI).²

Pembangunan SPN Padang Besi juga bersamaan dengan pembangunan SPN-SPN di beberapa kota di Indonesia, yakni Sekolah Polisi Negara Deli Serdang (Sumatera Utara), Betung (Sumatera Selatan), Ciputat (Jakarta), Candi (Jawa Tengah), Maribaya (Jawa Barat), Purwokerto (Jawa Tengah), Mojokerto (Jawa Timur), Masohi (Maluku), dan lain-lain.³

Pendirian bangunan SPN Padang Besi ini menggunakan lahan yang dihibahkan oleh penduduk Padang Besi yang terdiri dari suku Jambak, Melayu, Sipanjang, Koto, Piliang, Caniago dengan lahan seluas 17,4 ha dengan syarat lahan tersebut tidak boleh diperjualbelikan, hanya boleh digunakan untuk

¹ Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi, *24 Tahun Pengabdian Dodiklat Padang Besi*, (Padang : Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi, 1985), hal.43.

² *Ibid*

³ Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, *Sejarah TNI Jilid III (1960-1965)*, (Jakarta : Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000), hal. 56.

pendidikan kepolisian.⁴ Pelaksanaan pembangunan SPN Padang Besi ini belum sempurna, tapi karena kebutuhan yang sangat mendesak maka pada bulan Juli 1962 dilakukan upacara pembukaan pendidikan untuk agen polisi tingkat pertama.⁵

Angkatan pertama dari agen polisi ini berjumlah 240 orang yang sebagian besar lulusan SR.⁶ Selain syarat berpendidikan sekolah rakyat, maka calon siswa harus melewati beberapa seleksi, antara lain: kesehatan, jasmani, pengetahuan umum dan mental ideologi. Lamanya pendidikan yang ditempuh siswa agen polisi adalah selama 6 bulan. Mereka mendapat pelajaran secara teori dan praktik di lapangan, sesuai dengan kurikulum pendidikan polisi.

Awal pembangunan kompleks SPN Padang Besi, sering ditemukan siswa yang ikut serta secara aktif melaksanakan penyelesaian bangunan fasilitas pendidikan. Selama proses pembangunan para siswa menggunakan garase mobil dan rumah sakit untuk ruang belajar. Tenaga instruktur pendidikan SPN pada awal pendidikan berasal dari anggota polri yang telah menyelesaikan pendidikan di Akademi Polisi dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).⁷

Tanggal 15 Januari 1963 secara resmi pendidikan Agen Polisi meluluskan siswa SPN Padang Besi sebanyak 239 siswa dan dilantik oleh Kepala Polisi Komisariat Sumatera Barat yaitu Komisaris Besar Polisi Drs. Soebroto Brotodiredjo,SH, sebanyak 25 orang diantaranya langsung ditempatkan dan

⁴ Surat Keputusan KAN Lubuk.Kilangan Nomor 31/KAN/LK/IV-1989.

⁵ Agen polisi merupakan anggota polisi penjaga keamanan.

⁶ Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi, *op. cit.*, hal.43.

⁷ Alumni Sekolah Polisi Bagian Tinggi Sukabumi, *Sejarah Pendidikan dan Patriotisme Kepolisian*, (Jakarta: Alumni Sekolah Polisi Bagian Tinggi Sukabumi, 1993), hal. 55.

ditugaskan di SPN Padang Besi sedangkan yang lainnya mulai mengisi kekosongan di berbagai wilayah khususnya di Sumatera Barat.⁸

Dari awal pendirian SPN telah mengalami beberapa kali perubahan nama, hal ini demi penyesuaian dengan struktur organisasi dalam rangka reorganisasi Polri. Surat Keputusan Menteri/ Kepala Staf Angkatan Kepolisian RI. No. Pol.:27/SK/MK/1963 tanggal 16 Mei 1963 yang berisi perintah SPN dirubah namanya menjadi SAK (Sekolah Angkatan Kepolisian). Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian No.Pol:42/SK/MK1964 pada tanggal 11 Agustus 1964 seluruh SAK dirubah kembali nama dan statusnya menjadi Depo Pendidikan dan Latihan (DEPLAT) sedangkan nama Kepala Sekolah Angkatan Kepolisian Cabang diganti menjadi Komandan Depo Pendidikan dan Latihan. DEPLAT dirubah menjadi DODIKLAT (Depo Pendidikan dan Latihan) berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol.:41/SK/MK/KAPOLRI/1971 pada tanggal 25 April 1971 dan sebutan Komandan Dodiklat dirubah menjadi Kepala Dodiklat. Dengan adanya reorganisasi di lingkungan Polri, berdasarkan Skep Kapolri Nomor : Skep/07/VII/1985 Dodiklat kembali menggunakan nama SPN (Sekolah Polisi Negara) dibawah Dit Diklat Polda.⁹

Sektor pendidikan Polri yang semula ditingkat pusat disebut Kobangdiklat (Komando Pengembangan Pendidikan dan Latihan), setelah reorganisasi diroboh menjadi Direktorat Pendidikan Polri. Hal ini dilakukan karena organisasi Polri ditingkat Mabes dan Polda yang semula menganut sistem organisasi Komando dirubah menjadi sistem Direktorat. Namun pada prinsipnya beban tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh Direktorat Pendidikan Polri dan jajarannya

⁸Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi, *op. cit.*, hal.44.

⁹ *Ibid.*, hal.45.

tetaplah sama, yakni membina, mengelola dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan polisi.¹⁰

Sejak awal pendirian Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi dari tahun 1961 hingga tahun 2002 telah menghasilkan lulusan sekitar 10.422 personil kepolisian¹¹ yang bertugas di berbagai wilayah di Indonesia, tidak sedikit dari mereka yang menduduki jabatan penting di instansi kepolisian terkait.

Bertitik tolak pada kenyataan tersebut, sangat menarik untuk mengungkapkan sebuah tulisan mengenai Sejarah Pendidikan Polisi yang mana Sekolah Polisi Negara (SPN) telah mendidik, melatih fisik maupun mental untuk dapat menghasilkan polisi-polisi terampil. Pendidikan polisi yang berada di Sumatera Barat dikenal dengan Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi. Penelitian ini juga didorong oleh masih sedikitnya penulisan tentang lembaga pendidikan SPN Padang Besi khususnya dalam kerangka analisis sejarah.

Beberapa tulisan yang berkaitan dengan Sekolah Polisi Negara yang penulis temukan diantaranya adalah tulisan Ani Purwanti yang berjudul *Profil Sekolah Polisi Negara (SPN) di Jawa Tengah*, ditulis pada tahun 2003.¹² Tulisan ini membahas tentang pendidikan Sekolah Polisi Negara (SPN) di Jawa Tengah, dimana SPN Jawa Tengah sebagai lembaga pendidikan dasar polisi dalam rangka menyiapkan polisi profesional dan mandiri. Sekolah Polisi Negara Purwokerto mendidik polisi bintara untuk wilayah Jawa Tengah. Selama ini pola pendidikan yang diterapkan adalah 6 bulan proses belajar dan setelah itu langsung bertugas di masyarakat baik sebagai penjaga ketertiban masyarakat maupun ujung tombak

¹⁰ Alumni Sekolah Polisi Bagian Tinggi Sukabumi, *op. cit.*, hal. 59.

¹¹ *Data Siswa Tahun 1961-2002*

¹² Ani Purwanti, *Profil Sekolah Polisi Negara (SPN) di Jawa Tengah*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2003), hal. 50.

penegakan hukum serta tantangan terbesar saat ini yaitu bukan sebagai alat penguasa.

Tulisan tentang lembaga pendidikan sekolah kepolisian lainnya ditulis oleh Satjipto Rahardjo yang berjudul *Membangun Polisi Sipil*,¹³. Tulisan Satjipto Rahardjo membahas tentang pendidikan Polri dengan memakai konsep *flexeducation* artinya suatu pola pendidikan yang menyiapkan para anak didik untuk mengembangkan sikap dasar yang luwes pada waktu harus menjalankan pekerjaan pemolisian di masyarakat nanti.

Tulisan lain yang membahas tentang Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi yang berjudul “*24 Tahun Pengabdian Dodiklat Padang Besi*”.¹⁴ Dalam buku ini membahas awal pendirian SPN Padang Besi serta perkembangan pendidikan SPN Padang Besi dari tahun 1961-1985. Buku ini hanya sebagian menggambarkan pendidikan yang ada di SPN Padang Besi hingga tahun 1985.

Berdasarkan dari hasil karya tulis yang disebut di atas, belum ada yang melakukan penelitian kepada Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi selama (41 tahun). Oleh karena itu, penulisan ini diberi judul, *Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi 1961-2002*.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Skripsi ini mengkaji tentang Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi 1961-2002. Untuk lebih memfokuskan kajian mengenai SPN Padang Besi ini maka dicoba merumuskan pertanyaan sebagai berikut :

¹³Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2007), hal. 23.

¹⁴ Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi, *op. cit.*, hal.17.

1. Apakah latar belakang berdirinya Sekolah Polisi Negara (SPN) di Padang Besi
2. Bagaimana perkembangan Sekolah Polisi Negara dalam kurun waktu 1961-2002?
3. Bagaimana penerapan kurikulum Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi selama tiga periode yaitu Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi?

Batasan temporal yang diambil yakni dari tahun 1961-2002. Tahun 1961 diambil sebagai batasan temporal awal karena pada tahun 1961 inilah Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi didirikan. Batasan temporalnya didasarkan pada manajemen pengelolaan sekolah oleh Polri ketika dibawah naungan Tentara Nasional Indonesia, yaitu pada awal pendiriannya tahun 1961 dan berakhir pada tahun 2002, saat Polri sudah tidak berada di bawah naungan TNI. Sehingga Polri bisa menjalankan kewenangannya sendiri sebagai aparat keamanan dan ketertiban. Hal ini juga berpengaruh terhadap sistem pendidikan di SPN.

Batasan spasial yakni terfokus di kota Padang. Batasan spasial ini diambil karena Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi ini terletak dan didirikan di Kota Padang, tepatnya di daerah Padang Besi.

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan penulisan adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang berdirinya Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi.
2. Untuk mengetahui perkembangan Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi dalam kurun waktu 1961-2002.
3. Untuk mengetahui penerapan kurikulum Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi selama tiga periode yaitu Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi

Sedangkan manfaat penelitian adalah untuk menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dalam hal penelitian, dan manfaat penelitian bagi masyarakat yaitu untuk memperkaya khasanah penulisan dalam penelitian ilmiah.

D. Kerangka Analisis

Langkah yang sangat penting dalam membuat suatu analisis sejarah adalah menyediakan suatu kerangka pemikiran atau kerangka analisis yang menyangkut kondisi yang akan dipakai dalam membuat analisis tersebut.¹⁵ Sesuai dengan judul penulisan ini “Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi 1961-2002” maka penulisan ini dikategorikan ke dalam kajian sejarah pendidikan. Sejarah pendidikan ialah uraian yang sistematis dari segala sesuatu yang telah dipikirkan dan dikerjakan dalam lapangan pendidikan pada waktu yang telah lampau.¹⁶

Menurut Slamet Imam Santoso pendidikan adalah usaha etis dari manusia, dan masyarakat. Demikian sehingga dapat mengembangkan semua bakat seorang sampai tingkat optimal dalam batas hakikat individu, dengan tujuan supaya tiap manusia bisa secara terhormat ikut serta dalam pengembangan manusia dan masyarakatnya terus menerus mencapai martabat kehidupan yang lebih tinggi.¹⁷

Lembaga pendidikan ada yang bersifat formal (sekolah) dan informal (keluarga dan masyarakat). Pendidikan formal didapatkan melalui sebuah wadah atau tempat yang disebut sekolah. Sekolah adalah sebuah lembaga pendidikan formal dengan tujuan meningkatkan mutu tenaga kerja dalam hal ini khususnya

¹⁵Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. (Jakarta:Gramedia,1993), hal. 2.

¹⁶I.Djumbuh, *Sejarah Pendidikan*, (Bandung:Bina Ilmu,1976), hal.1.

¹⁷Slamet Imam Santoso, *Pendidikan di Indonesia dari Masa Ke Masa*, (Jakarta: Haji Mas Agung,1987), hal. 97.

berkaitan dengan pembentukan dan pengembangan kepribadian, bakat, sikap mental, pengetahuan dan kecerdasan, keterampilan, termasuk kreativitas dan daya analisis.¹⁸ Sekolah-sekolah ini ada yang dikelola oleh pemerintah dan ada pula yang dikelola oleh pihak swasta, dimana biasanya dipegang oleh sebuah organisasi atau lembaga.

Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi yang dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui keberadaannya oleh masyarakat disekitarnya, karena memberikan kontribusi seperti; pengambilan sumber daya manusia dalam masyarakat sebagai anggota-anggotanya sehingga menekan angka pengangguran¹⁹

Sekolah Polisi Negara (SPN) merupakan salah satu lembaga pendidikan yang bertujuan untuk mendidik dan membekali nilai-nilai idealisme serta patriotisme sehingga dapat menghasilkan anggota polisi yang berdisiplin dan bermoral, mempunyai jasmani yang sehat dan kuat, mempunyai tekhnis profesional khas kepolisian yaitu polisi berkualitas yang dapat menjaga keamanan masyarakat. Pendidikan Kepolisian yang dimaksud adalah pendidikan yang bercorak pendidikan militer, lebih diseragamkan dengan pendidikan militer angkatan darat sebagai acuan. Sapta Marga dan Sumpah Prajurit menjadi

¹⁸ Redja Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan : Sebuah Studi di Awal Tentang Dasar-Dasar Pendidikan Pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 6.

¹⁹ Nasution. S, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, (Bandung: Jemmars, 1983), hal.25.

pedoman anggota-anggota kepolisian sebagai anggota ABRI, di samping Tri Brata.²⁰

Dimasa lalu, setidaknya hingga tahun 2002 pendidikan kepolisian adalah bagian integral dari pembinaan prajurit ABRI yang mempunyai peranan penting bagi pembentukan dan pengembangan kualitas prajurit yang berjiwa Pancasila dan Sapta Marga. Pendidikan prajurit berpedoman kepada falsafah dan asas-asas pendidikan ABRI yaitu “Dwi Warna Purwa Cendikia Wusana”. Maknanya yaitu mengutamakan pembentukan kepribadian agar memiliki jiwa kejuangan yang tinggi dan dilengkapi dengan keahlian yang tinggi, sehingga menghasilkan pejuang prajurit yang professional.²¹

Pendidikan dilaksanakan secara berjenjang sesuai strata kebutuhan personil dan kemampuan yang diinginkan untuk mendukung tugas pokok organisasi. Karena perkembangan zaman dan adanya reorganisasi polri, maka beberapa Lembaga Pendidikan Polri mengalami perubahan guna memenuhi tuntutan tugas di lapangan. Mengingat negara semakin maju, maka kemampuan personil polri juga dituntut semakin lebih baik serta profesional dalam arti mampu dan terampil melaksanakan tugas di lapangan, baik di bidang operasional polri maupun bidang pembinaan Kamtibmas.²²

Pendidikan dasar merupakan pendidikan yang mentransformasi dari masyarakat umum menjadi polisi. Demikian halnya pada pendidikan-pendidikan pengembangan yaitu ada transformasi menjadi lebih profesional atau menjadi lebih peka dan peduli terhadap masalah-masalah kepolisian maupun masalah-

²⁰Harsja W. Bachtiar, *Ilmu Kepolisian Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan yang Baru*, (Jakarta:Gramedia,1995), hal. 56.

²¹ Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, *Sejarah TNI Jilid V(1984-2000)*, (Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000), hal. 23.

²² Alumni Sekolah Polisi Bagian Tinggi Sukabumi (Kotoka), *op. cit.*, hal. 58.

masalah sosial kemasyarakatan dan masalah-masalah kemanusiaan. Pelatihan adalah untuk ketrampilan atau keahlian di bidang-bidang tertentu seperti penyidikan, penanganan fungsi-fungsi polisi lalu lintas, menembak, mengemudi, bela diri dan sebagainya. Pengetahuan dan ketrampilan bagi petugas polisi sangat diperlukan karena polisi tugasnya adaah sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Dalam mendukung tugas pokok polisi maka diselenggarakan berbagai macam pendidikan yaitu:

“Pendidikan Pembentukan, adalah pendidikan yang dilakukan untuk membentuk kepribadian, sikap mental dan membekali pengetahuan dan keterampilan dasar kepolisian yang diperlukan sesuai dengan peranannya baik secara Tamtama, Bintara maupun Perwira.

Pendidikan Kejuruan adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk membekali pengetahuan dan keterampilan di bidang tugas kepolisian baik operasional maupun pembinaan polri secara lebih spesifik.

Pendidikan Pengembangan Umum adalah pendidikan yang bertujuan mengembangkan dan peningkatan pengetahuan dasar kepolisian yang telah diperoleh sebelumnya.

Pendidikan Pengembangan Keahlian adalah pendidikan untuk memperdalam penguasaan ilmu kepolisian, hukum kepolisian, disiplin ilmu tertentu yang diperlukan untuk mendukung tugas kepolisian sesuai dengan syarat-syarat kemampuan pekerjaan/jabatan tertentu yang ditentukan.”²³

Secara temporal penulisan ini termasuk sejarah kontemporer, sesuai dengan konsep Nugroho Notosusanto yang menyatakan bahwa sejarah kontemporer ruang lingkupnya sejak abad ke-20.²⁴ Penulisan ini secara spasial termasuk kategori sejarah lokal. Sejarah lokal menurut Taufik Abdullah adalah sebuah kajian sejarah yang mengacu pada proses perkembangan kehidupan manusia pada masa lampau yang mendiami suatu tempat tertentu.²⁵ Dalam hal ini kota Padang.

²³ *Ibid.*, hal.61.

²⁴ Nugroho Notosusanto. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*, (Jakarta :Inti indayu Press,1984), hal. 6-8.

²⁵ Taufik Abdullah. *Sejarah Lokal di Indonesia*. (Yogyakarta :Gajah Mada University Press),1985, hal. 9-10.

E. Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari empat tahap yakni: heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Heuristik adalah proses pengumpulan data atau sumber. Sumber ini terdiri dari dua macam yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer didapatkan melalui penelitian kearsipan dan wawancara,) seperti: SK (Surat Keputusan) berdirinya Sekolah Polisi Negara (SPN) No.Pol:62/SK/MK/1961, No. Pol.:27/SK/MK/1963, No.Pol:42/SK/MK1964, No.Pol.:41/SK/MK/KAPOLRI/1971, Skep Kapolri Nomor : Skep/07/VII/1985. Foto-foto pejabat SPN Padang Besi, Kurikulum 1961-2002, data jumlah siswa 1961-2002, dan data staf pengajar 1961-2002. Wawancara dilakukan dengan Jonisman (Ka Bagjarlat), Himsar Siregar (Ka Korsis), Adolof Ikhwan (Ka Subbagrenmin), Sonny Simatupang (alumni), Maad Acin (Alumni), Slamet BS (alumni), Syarbani (alumni), Rahmat Hakiki (alumni), Syamsul Bahri (mantan Waka SPN), Bartius (sekretaris KAN Lubuk Kilangan). Sumber sekunder didapat melalui studi kepustakaan yaitu menggunakan literatur-literatur yang berkaitan langsung dengan topik penulisan. Literatur-literatur ini didapatkan di Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, dan Perpustakaan daerah.

Kemudian data yang diperoleh dilanjutkan kepada tahap kritik, yaitu sebuah metode untuk mengetahui keabsahan sumber atau keaslian sumber. Kritik ini bertujuan untuk mendapatkan fakta sejarah. Kritik ini terdiri dari dua macam yakni kritik ekstern dan kritik interen. Kritik ekstern adalah kritik mengenai keaslian sumber, sedangkan kritik interen adalah kritik mengenai keakuratan dan keautentikan sumber. Kritik ini bertujuan agar penulis tidak hanya menerima saja

hasil yang didapatkan dilapangan, melainkan penulis harus mencari kebenaran dari hasil penelitian itu terlebih dahulu.²⁶

Interpretasi adalah menafsirkan fakta sejarah dan merangkai fakta tersebut hingga menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal, dimana hal ini berguna untuk menentukan fakta sejarah. Dalam interpretasi, seorang sejarawan dianjurkan menggunakan bantuan ilmu-ilmu sosial atau ilmu bantu lainnya dalam upaya mengungkap hakikat dibalik peristiwa.

Historiografi atau penulisan adalah proses penyusunan fakta-fakta sejarah dan berbagai sumber yang telah diseleksi dalam sebuah bentuk penulisan sejarah. Historiografi atau penulisan sejarah dalam ilmu sejarah merupakan titik puncak seluruh kegiatan penelitian sejarah. Dalam metodologi sejarah, historiografi merupakan bagian terakhir. Historiografi tidak terlepas dari data-data yang mendukung guna penulisan sejarah. Historiografi merupakan usaha pendataan sumber-sumber yang telah tersedia terhadap kajian-kajian kritis yang ada.²⁷

F. Sistematika Penulisan

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka analisis, metode penelitian dan bahan sumber serta sistematika penulisan.

Bab II menggambarkan tentang latar belakang berdirinya Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi yang terdiri dari sejarah berdirinya Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi, Hubungan Pendirian Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi dengan Peristiwa Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Lokasi Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi, Luas Sekolah Polisi

²⁶Sartono Kartodirdjo. *Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1993), hal. 14.

²⁷ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1994), hal. 94.

Negara (SPN) Padang Besi, dan Fasilitas Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi.

Bab III menggambarkan perkembangan Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi dalam tiga periode, yaitu SPN pada masa Orde Lama, SPN pada masa Orde Baru dan SPN pada era reformasi.

Bab IV merupakan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.



BAB II

LATAR BELAKANG PENDIRIAN SEKOLAH POLISI NEGARA (SPN)

PADANG BESI

A. Sejarah Sekolah Polisi Negara (SPN) Nasional

Kedudukan, tugas, fungsi, organisasi dan hubungan tata cara kerja kepolisian pada zaman Hindia Belanda tentu diabdikan untuk kepentingan pemerintah kolonial. Pada tahun 1911 pemerintah Hindia Belanda membuka pendidikan untuk Agen Polisi¹ di Batavia, Semarang dan Surabaya. Pendidikan Kepolisian ini bertujuan untuk menambah personel Polisi di tempat masing-masing. Pada tahun 1914 pendidikan polisi di Semarang dan di Surabaya dihapuskan, kemudian untuk Agen Polisi dan Inspektur polisi² dibuka pula pendidikan untuk Commissaris van Politie (Komisaris Polisi).³

Pada tahun 1918 di Batavia dibuka lagi secara lebih teratur pendidikan Aspirant Commissaris van Politie. Dengan demikian beberapa tingkat pendidikan kepolisian dilaksanakan di Batavia dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Pendidikan untuk Inspektur Polisi dan Komisaris Polisi diutamakan untuk orang-orang Belanda. Hal ini didasarkan atas pertimbangan jabatan, pangkat-pangkat menengah dan tinggi adalah untuk orang Eropa. Oleh karena itu bagi orang pribumi (Indonesia) sangat sulit untuk dapat masuk pendidikan tersebut. Selain harus diteliti silsilah keturunan dari para calon yang diutamakan adalah

¹ Agen polisi merupakan anggota polisi menjaga keamanan, agen polisi sama dengan pegawai kontrak yang tidak mempunyai nomor induk pegawai. Untuk menjadi pegawai polisi mereka harus mengikuti tes lagi.

² Inspektur Polisi sekarang merupakan pangkat perwira pertama, terdiri dari Inspektur Polisi Dua (IPDA), Inspektur Polisi Satu (IPTU), dan Ajun Komisaris Polisi (AKP).

³ Alumni Sekolah Polisi Bagian Tinggi Sukabumi (Kotoka) th.1943-1945. *Sejarah Pendidikan dan Patriotisme Kepolisian* (Jakarta: Alumni Sekolah Polisi Bagian Tinggi Sukabumi, 1994), hal. 15.

kesetiannya kepada Pemerintah Belanda.⁴ Pada tahun 1925 Sekolah Polisi di pindahkan ke Sukabumi, di Sekolah ini diselenggarakan pendidikan untuk Commissaris Politie⁵, Inspektur Polisi⁶, Mantri Polisi⁷, Hopagen Polisi⁸, Posthuis Komandan⁹, Reserse¹⁰, dan Agen polisi

Setelah Pemerintah Hindia Belanda dalam Perang Dunia II menyerah kepada tentara Jepang pada tanggal 9 Maret 1942, Sekolah Polisi yang ada di Sukabumi digunakan untuk mendidik anggota kepolisian di Pulau Jawa. Sekolah ini dikenal dengan sebutan Jawa Keisatsu Gakko, pada sekolah ini diselenggarakan :

1. Bagian Rendah (*Futsuka*)

Pendidikan untuk calon Agen Polisi (*junsa*)¹¹, pendidikan ini bertujuan untuk memperbanyak jumlah anggota kepolisian yang berpendidikan dasar kepolisian. Lama pendidikan empat bulan dengan syarat berijazah Sekolah Rakyat lima tahun, berbadan sehat dan lulus ujian masuk, setelah tamat diangkat menjadi Agen Polisi klas III (*santo junsa*)¹². Ijazah *futsuka* dengan pengalaman praktek

⁴ *Ibid.*

⁵ Commissaris Politie melaksanakan pendidikan selama 3 tahun. Sekarang jabatan Commissaris Politie setingkat dengan pangkat Perwira Polisi Menengah yaitu Komisararis Besar Polisi.

⁶ Inspektur Polisi melaksanakan pendidikan selama 1 hingga 2 tahun. Sekarang Inspektur Polisi merupakan pangkat Perwira Pertama terdiri dari Inspektur Polisi Dua (IPDA), Inspektur Polisi Satu (IPTU), dan Ajun Komisararis Polisi (AKP).

⁷ Mantri Polisi melaksanakan pendidikan selama 1 tahun, merupakan pegawai pembantu camat yang bekerja melaksanakan tugas kepomongprajaan. Mantri Polisi sekarang setingkat dengan Polisi Pamong Praja.

⁸ Hopagen Polisi melaksanakan pendidikan selama pendidikan selama 9 bulan, hopagen polisi merupakan agen polisi utama. Hopagen Polisi sekarang setingkat dengan Bintara yaitu Brigadir Polisi.

⁹ Posthuis Komandan melaksanakan pendidikan selama 9 bulan, Posthuis Komandan merupakan komandan pos polisi.

¹⁰ Reserse salah satu dari fungsi kepolisian yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan secara professional. Reserse melaksanakan pendidikan selama 9 bulan.

¹¹ Agen Polisi (*Junsa*), sama dengan pendidikan pada masa Belanda dimana agen polisi (*junsa*) merupakan anggota polisi menjaga keamanan.

¹² Agen Polisi Klas III setingkat dengan Agen Polisi Utama

disamakan dengan tingkat pendidikan umum SLTP. Hingga Jepang menyerah pada tentara Sekutu telah dididik sebanyak 12 angkatan (*kai*) dan lulus *futsuka* ini diperkirakan berjumlah 3000 orang.¹³

2. Bagian Tinggi (*Kotoka*)

Bagian Tinggi (*kotoka*) untuk mendidik dalam rangka kaderisasi sebagai calon perwira kepolisian. Lama pendidikan 9 bulan dengan syarat minimal berijazah Sekolah Menengah Pertama, berbadan sehat dan lulus ujian masuk, setelah lulus diangkat sebagai calon Pembantu Inspektur Polisi (*Minarei Keibuho*) dengan pangkat komandan (*junsabucho*) selama 6 bulan. Ijazah *kotoka* dengan pengalaman praktik disamakan dengan ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).¹⁴

Setelah Jepang dikalahkan dalam Perang Dunia II, Republik Indonesia melanjutkan Sekolah Polisi di Sukabumi sebagai tempat pendidikan. Dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 19 Agustus 1945 diambil keputusan, bahwa polisi termasuk dalam Departemen Dalam Negeri. Berdirinya Sekolah Polisi Nasional Sukabumi tidak terlepas dari pembentukan polisi dari zaman Belanda, Jepang dan sesudah perang kemerdekaan. Sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia para guru/inspektur bangsa Indonesia di Jawa Keitsatsu Gakko, Sukabumi, mengambil alih kekuasaan pendidikan dari penjajah Jepang. Pada 19 Agustus 1945 nama Jawa Keitsatsu Gakko diganti menjadi Sekolah Polisi Negara Republik Indonesia di Sukabumi (SPN) Sukabumi.¹⁵

¹³ M.Oudang. *Perkembangan Kepolisian di Indonesia*, (Jakarta:Mahabrata,1952), hal. 45.

¹⁴ *Ibid.* hal. 47.

¹⁵ *Ibid.* hal. 65.

Sebagai pimpinan atau Direktur Sekolah diangkat Komisaris Polisi Klas I¹⁶ Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo dan wakilnya Komisaris Polisi Klas II¹⁷ Boestami Aman. Kemudian setelah R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo diangkat menjadi Kepala Kepolisian Negara pada tanggal 29 September 1945, maka Komisaris Polisi Klas II Bustami Aman diangkat menjadi Direktur Sekolah tersebut.¹⁸ Sekolah Polisi Negara (SPN) Sukabumi mempunyai tiga bagian yaitu :

1. Pendidikan bagian rendah untuk Agen Polisi (Tamtama) dan Komandan Polisi (Bintara).
2. Pendidikan bagian menengah untuk mendidik Pembantu Inspektur Polisi dan Inspektur Polisi¹⁹
3. Pendidikan bagian tinggi untuk mendidik Komisaris Polisi.

SPN Sukabumi tidak hanya sebagai pusat pendidikan dan latihan bagi Tamtama, Bintara dan Perwira Polisi, melainkan menerima juga pegawai-pegawai dari luar polisi yang mempunyai tugas-tugas khusus kepolisian. Dengan dipusatkannya pendidikan polisi di Sukabumi pada tahun 1949, diharapkan pendidikan dan latihan tersebut dapat membentuk tenaga-tenaga polisi yang berdisiplin dan bermoral dan mempunyai jasmani sehat dan kuat.²⁰

Pendidikan Bagian Rendah (*futsuka*) dilangsungkan di Sukabumi hingga kota ini jatuh lagi di tangan Belanda. Lama pendidikan untuk agen polisi selama 6 bulan sampai 1 tahun sedangkan Bagian Menengah dan Tinggi (*kotoka*) selama 1 sampai 4 tahun. Lulus dari Bagian Rendah disamakan dengan keluaran sekolah

¹⁶ Komisaris Polisi Klas I sekarang setingkat Komisaris Besar Polisi

¹⁷ Komisaris Polisi Klas II sekarang setingkat dengan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP).

¹⁸ Alumni Sekolah Polisi Bagian Tinggi Sukabumi, *op. cit.*, hal. 23.

¹⁹ Pembantu Inspektur Polisi dan Inspektur Polisi sekarang setingkat dengan perwira pertama.

²⁰ Alumni Sekolah Polisi Bagian Tinggi Sukabumi, *op. cit.*, hal 31.

menengah dan diangkat menjadi Agen Polisi Kelas III, sedangkan lulus dari Bagian Tinggi disamakan keluaran sekolah menengah atas dan diangkat menjadi komandan polisi, kemudian setelah praktek selama 6 bulan dan diangkat menjadi Pembantu Inspektur Polisi.²¹

Pendidikan kepolisian di Sukabumi tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan karena kondisi Indonesia yang masih dalam masa transisi dan suasana perjuangan bangsa Indonesia yang semakin meningkat. Oleh sebab itu Pimpinan Kepolisian RI menganggap pendidikan di Sukabumi tidak mungkin dilaksanakan. Maka pendidikan untuk menengah tinggi dipindahkan ke Mertoyudan dimana pendidikan tamtama atau agen juga dipindahkan ke Mertoyudan

Bulan Mei 1946 Jawatan Kepolisian Negara mengeluarkan pengumuman, bahwa Kepolisian Negara membutuhkan pemuda-pemuda Indonesia untuk dididik menjadi Komisarisi Polisi dan Inspektur Polisi. Lama pendidikan untuk Pendidikan Kader Menengah direncanakan dua tahun dan untuk Pendidikan Kader Tinggi selama empat tahun. Pada tanggal 1 Juli 1946 dengan ketetapan pemerintah No. 11/SD/1946 dibentuk Jawatan Kepolisian Negara yang bertanggungjawab langsung kepada Perdana Menteri. Semua fungsi kepolisian disatukan dalam Jawatan Kepolisian Negara yang memimpin kepolisian diseluruh tanah air, dengan demikian lahirlah Kepolisian Nasional Indonesia yang diperingati sebagai Hari Bhayangkara.²²

Pada tanggal 21 Juli 1947 Pemerintah Belanda di Jakarta melancarkan Agresi Militer, yang dinamakan Aksi Polisionil yang terjadi di Jawa dan Sumatera. Tentara Nasional Indonesia dan para pejuang lainnya ikut bertempur

²¹ M.Oudang, *op. cit.*, hal. 178.

²²Harsya W. Bachtiar, *Ilmu Kepolisian Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan yang Baru*, (Jakarta: PT Gramedia,1994), hal. 47.

dalam mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Dalam keadaan yang berbahaya ini maka pada tanggal 1 Agustus 1947, atas dasar Undang-undang Keadaan Bahaya dan Instruksi Kepala Kepolisian Negara, Dewan Pertahanan Negara melalui Ketetapan No.49 tahun 1946 menyatakan bahwa Polisi negara dijadikan bagian dari tentara untuk kepentingan mempertahankan negara.²³

Berdasarkan keputusan Dewan Pertahanan Negara No.49 tahun 1946 yang memasukan polisi negara menjadi kesatuan tentara, maka anggota kepolisian memperoleh pangkat seperti yang digunakan oleh tentara. Pangkat Polisi Negara disesuaikan dengan ketentaraan seperti berikut:

Kepala Kepolisian Negara	}	Jendral Mayor
Wakil Kepala Kepolisian Negara		
Kommissaris Besar Polisi	}	Kolonel
Pembantu Kommissaris Besar Polisi		
Kommissaris Polisi kl.I		Letnan Kolonel
Kommissaris Polisi kl.II		Mayor
Inspektur Polisi kl. I	}	Kapten
Inspektur Polisi kl.II		
Pembantu Inspektur Polisi kl I		Letnan I
Pembantu Inspektur Polisi kl II		Letnan II
Komandan Polisi		Sersan Mayor
Agan Polisi kl I		Kopral
Agan Polisi kl II		Prajurit I
Agan Polisi kl III		Prajurit II ²⁴

Selama Agresi Militer Belanda berlangsung, pemerintah menghimbau Kepala Kepolisian Negara untuk sementara berkedudukan di Yogyakarta sampai keadaan aman kembali. Tanggal 1 Desember 1947 untuk sementara waktu seluruh Jawatan Kepolisian Negara dipindahkan ke Yogyakarta. Pemerintah

²³ *Ibid*

²⁴ M. Oudang, *op.cit.*, hal 86.

Belanda kembali melancarkan Agresi Militer II, dalam aksi ini para petinggi negara ditangkap dan Belanda menduduki Yogyakarta. Dalam keadaan perang ini kepolisian juga ikut menjalankan tugas kemiliteran dalam perjuangan melawan Belanda.²⁵

Selama terjadinya Agresi Militer Belanda II tidak ada peluang bagi kepolisian untuk mengembangkan profesinya di wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Untuk itu Jawatan Kepolisian mempersiapkan suatu jenis perwira kepolisian yang baru yang berpendidikan tinggi. Para perwira polisi ini dipersiapkan melalui program pendidikan tinggi dalam ilmu kepolisian yang diselenggarakan oleh Akademi Polisi.

Akademi Polisi didirikan pada tanggal 17 Juni 1947 di Mertoyudan (Magelang), pembukaan Akademi Polisi ini dihadiri oleh Presiden Soekarno dan wakilnya Moh. Hatta. Dalam mengembangkan pendidikan di Mertoyudan tidaklah mudah, kesulitan-kesulitan timbul dalam bidang administrasi, pengajaran/dosen dan fasilitas-fasilitas sarana pendidikan. Oleh karena itu pada tanggal 1 September 1948 Akademi Polisi dipindahkan ke Yogyakarta. Akademi Polisi ini menempati salah satu ruangan di gedung ex Sekolah Susteran Jalan Senopati Yogyakarta. Akademi Polisi dipimpin oleh Soepomo dan Kombes Pol. Soebarkah sebagai Sekretaris Dewan Guru Besar Akademi Polisi.²⁶

Perkuliahan Akademi Polisi di Yogyakarta dapat berjalan dengan lancar, walaupun perjuangan bangsa mengganggu ketenangan belajar. Adapun kesulitan yang dihadapi antara lain:

²⁵ *Ibid.*, hal 90.

²⁶ Harsya W. Bachtiar, *Ilmu Kepolisian Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan yang Baru*, (Jakarta: PT Gramedia, 1994), hal. 74.

“Kurangnya tenaga staf administrasi menyebabkan kurang lancarnya pelajaran. Keuangan yang masih bergantung kepada keuangan SPN Mertoyudan baik untuk kebutuhan peralatan maupun kebutuhan hidup mahasiswa dan dosen-dosen. Dukungan logistik yang kurang dan tidak mencukupi. Belum adanya peraturan-peraturan khusus Akademi Polisi sebagai pegangan.”²⁷

Pada bulan Januari 1950, sesudah pemerintah Hindia Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, dan Jakarta menjadi ibu kota pemerintahan Republik Indonesia banyak kantor dan pejabat yang pada permulaan masa perang kemerdekaan pindah dari Jakarta ke Yogyakarta pindah kembali ke Jakarta. Akademi Polisi juga dipindahkan dari Yogyakarta ke Jakarta.²⁸

Atas usul pimpinan Jawatan Kepolisian Negara dan Dewan Kurator Polisi Akademi dalam rapat gabungan tanggal 4 Juli 1950 diambil keputusan merubah Akademi Polisi menjadi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Berdasarkan Surat Keputusan Perdana Menteri No. 47/PM/II/50 mulai tanggal 1 September 1950 dengan resmi nama Akademi Polisi berubah menjadi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).²⁹

Berdasarkan surat keputusan Kementrian Dalam Negeri tanggal 14 September 1950 mulai dibuka penerimaan calon mahasiswa. Adapun syarat untuk menjadi mahasiswa mempunyai ijazah SMA dan diutamakan bekas TRIP (Tentara Republik Indonesia Pelajar), dan juga merupakan pegawai polisi aktif yang berijazah SLA. Sebagai bahan ujian untuk dapat diterima sebagai mahasiswa ialah Psicotest, Pendidikan Jasmani, Bahasa Inggris, dan Pengetahuan Umum.³⁰

²⁷ Alumni Sekolah Polisi Bagian Tinggi Sukabumi, *op. cit.*, hal 41

²⁸ Bachtiar, *op. cit.*, hal. 75

²⁹ *Ibid*

³⁰ Alumni Sekolah Polisi Bagian Tinggi Sukabumi, *op. cit.*, hal 46

Pada permulaan sesudah perang kemerdekaan berakhir, Kepolisian Indonesia baru bekerja dengan 16 perwira kepolisian yang memperoleh pendidikan tinggi di Perguruan Ilmu Kepolisian (PTIK). Mereka lulus dalam tahun 1952. Para perwira berpendidikan tinggi Angkatan I ini, yang sebagai angkatan menggunakan nama “Parikesit,” terdiri atas : Djoenarso, Hoengeng Imam Santoso, Mardjaman Tjokrodiredjo, Moerhadi Danoewilogo, Oetarman, Ostenrik Tjitro Soenarjo, Ratnaatmadja, Siswadji, Soebroto Brotodiredjo, Drs. Soedijono, Soedjono Partodidjojo, Moh. Soehardjo Soerjoroto, Soekahar, Soeroso, dan W.F. Sumampouw.³¹

Dalam menjalankan tugas sebagai anggota kepolisian, “Tribrata” dijadikan sebagai pedoman hidup anggota-anggota Kepolisian Republik Indonesia dan oleh sebab itu juga menjadi kode etik profesi kepolisian di Indonesia, dirumuskan oleh Djokosoetono dengan dibantu oleh Prijono, keduanya merupakan guru besar di PTIK. Pada tanggal 3 Mei 1954 untuk pertama kalinya “Tribrata” diucapkan. “Tribrata”, yang kemudian dijadikan pedoman hidup, pedoman bertindak bagi anggota kepolisian Republik Indonesia, menyatakan bahwa polisi itu adalah:

1. *Rastra sewakottama* (abdi utama dari pada nusa dan bangsa)
2. *Nagara yanotama* (warga negara utama dari pada negara)
3. *Yana anucasanadharma* (wajib menjaga ketertiban pribadi dari pada rakyat).³²

Indonesia banyak menghadapi masalah pemeliharaan ketertiban dan keamanan dalam negeri, salah satunya pada tanggal 15 Februari 1958 Let. Kol. Achmad Hussein sebagai Ketua Dewan Banteng mengumumkan berdirinya

³¹ Bachtiar, *op. cit.*, hal. 50.

³² *Ibid*, hal. 51.

Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Padang dengan Mr. Sjafrudin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri. Komandan Daerah Militer Sulawesi Utara dan Tengah Kol. D.J. Somba juga menyatakan dukungan Permesta terhadap pembentukan PRRI sehingga terjadi kerjasama antara PRRI dan Permesta. Tindakan yang dilakukan daerah ini ditanggapi oleh Pemerintah R.I dengan tindakan militer. Dalam tindakan militer ini diikutsertakan juga unsur-unsur Brigade Mobil (Brimob) dari Angkatan Kepolisian. Dalam bulan Mei 1961 pemberontakan PRRI berakhir dengan penangkapan para pemimpin PRRI oleh TNI-AD dan Angkatan Kepolisian.³³

Tahun 1960 berhubung jumlah anggota kepolisian di berbagai daerah di Indonesia sangat kurang terutama untuk golongan tamtama, sedangkan kebutuhan untuk penanggulangan keamanan dan mengisi kekurangan atau kekosongan itu diperlukan tenaga kepolisian yang lebih banyak dan muda-muda, maka pada tahun 1961 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kepala Kepolisian Negara No.Pol.:62/SK/MK/1961 pada tanggal 30 Desember 1961 di beberapa kota di Indonesia. SPN-SPN secara organisatoris berada di bawah Komdak, namun dalam hal teknis operasional di bawah kendali langsung Direktorat Pendidikan Polri yang bertugas dan bertanggungjawab dalam membina, mengelola dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan polri. Adapun lembaga pendidikan yang di bawah Polda adalah sebagai berikut: SPN Seaulawah (Aceh), SPN Sampali (Sumatera Utara), SPN Pekanbaru (Riau), SPN Pondok Meja (Jambi), SPN Pontianak (Kalimantan Barat), SPN Betung (Sumatera Selatan), SPN Kemiling (Lampung), SPN Lido (Metro Jaya), SPN Cisarua (Jawa Barat), SPN

³³ *Ibid.*, hal. 53

Purwokerto (Jawa Tengah), SPN Banyubiru (DIY), SPN Mojokerto (Jawa Timur), SPN Singaraja (Bali), SPN Kupang (Nusa Tenggara Timur), SPN Blanting (Nusa Tenggara Barat), SPN Banjarbaru (Banjarmasin), SPN Balikpapan (Kalimantan Timur), SPN Ciluk Riwut (Kalimantan Tengah), SPN Batua (Sulawesi Selatan), SPN Karombasan (Sulawesi Utara), SPN Labuan Panimba (Sulawesi Tengah), SPN Anggoota (Sulawesi Tenggara), SPN Paso (Maluku), SPN Jayapura (Jayapura), SPN Mandalawangi (Banten)³⁴

B. Hubungan Pendirian SPN Padang Besi dengan Peristiwa Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)

Berakhirnya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera Barat menimbulkan akibat yang sangat parah bagi masyarakat Sumatera Barat baik bagi pendukung PRRI maupun yang tidak mendukung PRRI. Penumpasan PRRI yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui operasi militer “Operasi 17 Agustus” yang berbentuk komando gabungan dari TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU dan merupakan awal perkembangan APRI. APRI menumpas PRRI dan membuat kehidupan masyarakat porak-poranda.³⁵

Meskipun tidak semua rakyat Sumatera Barat terlibat PRRI, namun dampaknya dirasakan begitu luas dan sangat mempengaruhi perilaku sosial dan politik orang Minangkabau sesudah peristiwa tersebut terjadi. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh mereka yang ikut terlibat, tetapi juga dirasakan oleh mereka yang tidak ikut terlibat. Bukan hanya mereka yang tinggal di Sumatera Barat tapi

³⁴ Markus Gunawan, *Buku Pintar Calon Anggota&Anggota Polri*, (Jakarta:Transmedia Pustaka, 2009), hal.94.

³⁵ Hasril Chaniago, Khairul Jasmi, *Brigadir Jendral Polisi Kaharoeudin Datuk Rangkyo Basa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hal. 251.

juga yang tinggal di rantau. Karena itu hampir semua masyarakat Sumatera Barat merasakan pahitnya akibat PRRI, sehingga harus menerima penghinaan sebagai “pemberontak” yang “kalah”.³⁶

Pemerintah Pusat menyusun rencana untuk mengubah status Komando Operasi 17 Agustus menjadi komando territorial setingkat Komando Daerah Militer (Kodam) dan dinamakan Kodam 17 Agustus. Perubahan status ini didasari oleh keinginan untuk menggantikan peran tentara (kesatuan tempur) mengganyang “pengkhianat bangsa” dengan tugas pembinaan territorial kepada warga daerah.³⁷ Tindakan lain yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat yaitu menempatkan tentara pusat sebagai pejabat daerah menggantikan pejabat sipil.

Perubahan lain adalah TNI-AD menempatkan perwira-perwira nonputra daerah sebagai komandan dari masing-masing unit territorial. Semua pangdam adalah orang Jawa, bahkan hampir semua prajurit juga berasal dari non-Minang, bahkan sejak pemberontakan PRRI jumlah orang Minang yang diterima menjadi calon tamtama, bintang atau perwira TNI juga menurun dengan drastis.³⁸

Pasca PRRI Sumatera Barat dikuasai oleh militer pemerintah pusat, masyarakat Minangkabau kehilangan hak-hak mereka sebagai warga negara. Mereka mengalami tekanan secara psikologis dengan kehadiran tentara pusat yang berada di pos-pos penjaga maupun tentara pusat yang berada di pelosok-pelosok daerah, mereka harus menunduk dan menghindar apabila bertemu dengan tentara pusat. Mereka bahkan mau berputar jalan yang jauh dibandingkan harus bertemu dengan tentara.

³⁶ Mestika Zed, *Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1995*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hal. 158.

³⁷ Gusti Asnan. *Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat Tahun 1950-an*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hal. 212.

³⁸ *Ibid.* hal. 213.

Hanya kaum komunis yang mendapatkan keuntungan dengan pemberontakan PRRI. Orang-orang PKI menggunakan kesempatan atau kekosongan politik untuk mengembangkan diri di daerah Sumatera Barat. PKI memanfaatkan lembaga OPR (Organisasi Pertahanan Rakyat) yaitu satuan sipil yang dipersenjatai, yang dibentuk untuk membantu APRI menumpas pemberontakan PRRI. PKI memasukkan anggotanya dalam tubuh OPR, dengan memasukkan anggotanya maka PKI dengan mudah melakukan tekanan fisik dan mental terhadap pelaku PRRI dan keluarganya. Dalam banyak hal pasukan OPR lebih aktif dan kejam dari anggota APRI dalam penumpasan PRRI.³⁹

Sehubungan dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kepala Kepolisian Negara No.Pol.:62/SK/MK/1961 untuk mendirikan Sekolah Polisi Negara (SPN) Cabang, maka berdasarkan Surat Keputusan No.Pol.:62/SK/MK/1961⁴⁰ pada tanggal 30 Desember 1961 didirikanlah SPN Cabang Padang Besi. Pendirian SPN Cabang Padang Besi yang secara administrasi membawahi Kepala Komisariat Sumatera Barat dan secara teknis berada di bawah Komando Pendidikan dan Latihan Kepolisian Republik Indonesia (KOPLAKRI). Polisi-polisi hasil didikan dari SPN Cabang Padang Besi ini diharapkan dapat menjaga, melindungi dan melakukan pembinaan terhadap masyarakat Sumatera Barat yang trauma dan takut terhadap tentara pusat pasca PRRI.

Masyarakat Sumatera Barat menyambut baik dengan pendirian Sekolah Polisi Negara (SPN) Cabang Padang Besi, masyarakat berharap dengan semakin banyaknya jumlah anggota polisi, masyarakat dapat merasa aman dan terlindungi. Tidak sedikit pemuda Sumatera Barat yang antusias untuk ikut mendaftar sebagai

³⁹Abrar Yusra. *Tokoh Yang Berhati Rakyat : Biografi Harun Zain*.(Jakarta: Yayasan Gebu Minang, 1997), hal. 95.

⁴⁰ Surat keputusan Kapolri No.Pol.62/SK/MK/1961, perihal berdirinya SPN Padang Besi.

calon agen polisi (tamtama). Pada umumnya pemuda yang mendaftar sebagai agen polisi dikarenakan lapangan pekerjaan yang sangat sedikit, sehingga mereka memutuskan untuk menjadi agen polisi. Disamping itu para pemuda juga ingin melindungi masyarakat yang menderita akibat pergolakan.⁴¹

Untuk masuk menjadi siswa agen polisi, mereka juga harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Mereka juga mengikuti persyaratan untuk menjadi calon siswa, adapun persyaratan untuk menjadi calon siswa agen polisi yaitu: Warga negara Indonesia dan beragama, sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, berijazah serendah-rendahnya Sekolah Rakyat, mempunyai tinggi minimal 160 cm, umur minimal 18 tahun hingga 22 tahun.⁴²

Penerimaan calon agen polisi (tamtama) diprioritaskan untuk masyarakat yang berasal dari Sumatera Barat (Minangkabau). Siswa yang diterima menjadi agen polisi adalah siswa yang berasal serendah-rendahnya dari tamatan Sekolah Rakyat. Diharapkan para lulusan agen polisi ini dapat mengisi kekosongan jumlah polisi yang ada di Sumatera Barat.⁴³

C. Pendirian Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi

Lokasi dibangunnya Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi di daerah Lubuk Kilangan merupakan prakarsa dari Gubernur Sumatera Barat Kaharuddin Datuk Rangkayo Basa pada tahun 1961. Sebelum ditetapkannya Padang Besi sebagai tempat didirikan Sekolah Polisi Negara (SPN), beliau mengajukan tiga lokasi tempat untuk mendirikan bangunan sekolah yaitu di Koto Tangah, Gadut, dan Padang Besi. Dipilihnya Padang Besi sebagai lokasi pendirian Sekolah Polisi

⁴¹ *Wawancara* dengan Syamsir, di Padang tanggal 10 November 2011.

⁴² *Wawancara* dengan Syamsir, di Padang tanggal 10 November 2011.

⁴³ *Wawancara* dengan Munar, di Padang tanggal 11 Desember 2011.

Negara (SPN) dikarenakan beberapa faktor yaitu medannya lebih cocok untuk latihan, serta adanya aliran air dan daerahnya yang cukup nyaman untuk ditempati.⁴⁴

Lahan tempat didirikannya Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi merupakan tanah ulayat Nagari Lubuk Kilangan seluas 17,4 ha. Saat mendirikan bangunan, lahan tersebut merupakan lahan kosong yang tidak ditempati, sebelum pendirian bangunan, pihak Kaharuddin Datuk Rangkyo Basa dan Soebroto Brotodiredjo menemui pihak ninik mamak, penghulu suku dan rangtuo adat nagari Lubuk Kilangan yang terdiri dari suku Jambak, Melayu, Koto, Sipanjang, Caniago, Piliang yang diwakili oleh Dasir Dt. R. Labih, Bais Dt. R. Bandaro, Syamsir Dt. Pamuncak, Djamaludin Dt. S. Marajo, Munyar Dt. R Basa Bumi, Syamrudin Dt. R Tadaris dan Udin Dt. Rajo Bukik.⁴⁵

Musyawarah yang dilaksanakan untuk menyampaikan maksud dan tujuan Kaharuddin Datuk Rangkyo Basa untuk meminta izin kepada ninik mamak meminjam lahan yang terletak di Lubuk Kilangan untuk mendirikan Sekolah Polisi Negara (SPN). Para ninik mamak berunding dengan kepala suku serta masyarakat Lubuk Kilangan dan mereka pun menghimbau kepada masyarakat yang merasa memiliki lahan tersebut. Tapi tidak ada satupun masyarakat Lubuk Kilangan yang mengaku sebagai pemilik lahan tersebut. Mengingat situasi Sumatera Barat yang sangat kekurangan tenaga polisi yang muda-muda maka ninik mamak, penghulu suku, rangtuo adat nagari serta masyarakat Lubuk

⁴⁴ *Wawancara* dengan Slamet B.S, di Padang tanggal 13 Januari 2012.

⁴⁵ *Wawancara* dengan Bartius Dt.R.Alam, di Padang tanggal 7 Januari.

Kilangan memberikan izin peminjaman lahan dengan syarat hanya digunakan selama adanya pendidikan dan lahan tersebut tidak boleh dijual.⁴⁶

Diumumkannya pendirian Sekolah-Sekolah Polisi Negara (SPN) Cabang diberbagai wilayah di Indonesia, maka dimulailah pendirian bangunan Sekolah Polisi Negara (SPN) di Padang Besi. Pembangunan Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi ini pada awal diadakan calon penerimaan siswa bangunannya masih belum sempurna, hal ini disebabkan kondisi Sumatera Barat sendiri belum pulih pasca pemberontakan. Meskipun dalam keadaan serba darurat baik gedung-gedung maupun ruangan belajar, penerimaan dan pendidikan untuk agen polisi tetap dilaksanakan.

Bangunan-bangunan SPN Padang Besi disamakan dengan bangunan-bangunan yang ada di SPN daerah-daerah lainnya di Sumatera Barat, baik luas bangunan maupun bentuk bangunan juga disamakan. Pembangunan ini tetap dilaksanakan hingga siswa masuk SPN dan mereka menggunakan sarana dan prasarana dalam keadaan yang serba darurat baik gedung-gedung maupun ruang belajar beserta alat-alat praktek yang sangat minim.⁴⁷

Pada awal masa pembangunan kompleks SPN Padang Besi pada tahun 1961 sering ditemukan para siswa serta instruktur turut serta secara aktif melaksanakan atau membantu pelaksanaan penyelesaian bangunan fasilitas pendidikan. Kegiatan- kegiatan seperti mengangkat batu, pasir, tanah hingga mengaduk semen, semua itu dilakukan oleh siswa secara bergotong-royong. Selama dalam proses pembangunan gedung maupun sarana dan prasarana

⁴⁶ Wawancara dengan Bartius Dt.R.Alam, di Padang tanggal 7 Januari.

⁴⁷ Wawancara dengan Slamet B.S, di Padang tanggal 13 Januari 2012.

pendidikan, siswa menggunakan rumah sakit dan garase sebagai tempat belajar, hal ini dikarenakan ruang belajar belum siap.⁴⁸

Pada tahun 1988, berdasarkan keputusan Kapolda Sumatera Barat Moch.Zahri Amin untuk menambah gedung baru sebagai sarana dan prasarana pendidikan, maka pihak SPN minta persetujuan kepada KAN untuk menambah gedung di lahan tersebut, Ka SPN pada saat itu dijabat oleh Letkol. Pol Soewardi mengirimkan surat kepada KAN Lubuk Kilangan dengan No. Pol : R/28/XI/1988/SPN⁴⁹ tanggal 28 November 1988 perihal permohonan penyelesaian sertifikat terhadap lahan yang ditempati Sekolah Polisi Negara Padang Besi.

Tanggal 10 April 1989 pihak KAN Lubuk Kilangan menyerahkan surat keputusan penguasaan hak pakai atas sebidang tanah ulayat Nagari Lubuk Kilangan No.31/KAN/LKLIV/1989 yang berlokasi di Kelurahan Indarung Rt.03 Rw.II kepada pihak SPN dihadapan Bapak Kapolda Sumatera Barat, Kolonel Polisi Moch.Zahri Amin⁵⁰ Selama tanah tersebut digunakan untuk kepentingan negara dalam hal ini untuk kepentingan pendidikan kepolisian, maka lahan tersebut boleh digunakan selama masa pendidikan dan tidak boleh diperjual belikan. Lahan SPN Padang Besi hanya bersifat hak pakai bukan hak milik.

⁴⁸ Wawancara dengan Slamet B.S, di Padang tanggal 13 Januari 2012.

⁴⁹ Surat Permohonan Penyelesaian Status Tanah Sekolah Polisi Negara Padang Besi.

⁵⁰ SK NO: 31/KAN/LK/IV/1989, mengenai Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Hak Pakai Tanah SPN Padang Besi.

BAB III

SEKOLAH POLISI NEGARA (SPN) PADANG BESI

A. SPN Masa Orde Lama (1961-1966)

Pendirian Sekolah Polisi Negara (SPN) tidak lepas dari pergolakan-pergolakan yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia seperti pergolakan DI/TII DI Jawa Barat, DI/TII DI Aceh, DI/TII di Sulawesi Selatan, DI/TII di Kalimantan Selatan, Republik Maluku Selatan (RMS), Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat.¹ Pendirian SPN ditujukan agar menghasilkan polisi yang dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat sipil di wilayah konflik.

Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat telah banyak mengakibatkan kerugian baik dari segi materi maupun mental masyarakat Sumatera Barat, tidak hanya mereka yang terlibat PRRI, bahkan rakyat yang tidak terlibat pun juga mengalami hal yang sama. Selama masa penumpasan PRRI, Sumatera Barat dinyatakan dalam keadaan darurat perang (SOB) dan merupakan daerah operasi militer. Status darurat perang baru dicabut sejak 1 Mei 1963 bersamaan dengan diberlakukannya tata tertib pemerintahan sipil di seluruh Indonesia. Selama operasi penumpasan PRRI inilah PKI di Sumatera Barat memperoleh peluang mengembangkan kekuatan dan pengaruh mereka dengan membonceng para perwira militer yang telah dipengaruhi komunis atau simpatisan PKI.²

Selama pergolakan PRRI dan beberapa tahun sesudahnya, adalah masa rakyat Sumatera Barat mengalami pahitnya akibat perang saudara, di mana kedua

¹ Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, *Sejarah TNI jilid III (1960-1965)*, (Jakarta : Pusat Sejarah dan Tradisi TNI,2000), hal .165.

² Hasril Chaniago, Khairul Jasmi, *Brigadir Jendral Polisi Kaharoeddin Datuk Rangkyo Basa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hal. 300.

belah pihak yang berhadapan telah saling melakukan kekejaman yang luar biasa. Dampak operasi militer terhadap pemberontakan PRRI berbeda di daerah perkotaan dengan daerah pedesaan. Di daerah perkotaan, kebijaksanaan pembinaan territorial resmi yang bersifat akomodatif dari Operasi 17 Agustus lebih dirasakan. Sementara di daerah pedesaan, di mana operasi tempur sering dilaksanakan dengan bantuan satuan OPR, suasana yang mencekam lebih terasa di kalangan penduduk. Anggota OPR dan wali nagari dari unsur komunis bertindak sewenang-wenang, termasuk memaksa penduduk untuk menjadi anggota PKI atau organisasi massanya.³

Pemberontakan PRRI yang terjadi mengakibatkan jumlah anggota polisi di Sumatera Barat kekurangan personilnya dalam menjalankan tugas menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, masyarakat Sumatera Barat sangat membutuhkan perlindungan anggota polisi dari ancaman tentara pusat. Maka pada tahun 1961 SPN Padang Besi membuka pendaftaran untuk menjadi siswa agen polisi. dibukanya Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi ini selain memberi kesempatan kepada pemuda untuk menanggulangi keamanan yang terjadi di Sumatera Barat juga disebabkan lapangan pekerjaan yang tidak ada.⁴

Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi diharapkan dapat menghasilkan polisi-polisi yang terlatih dalam menanggulangi masalah keamanan yang terjadi di Sumatera Barat akibat dari pemberontakan. Sesuai dengan fungsinya dimana polisi bertugas memberikan perlindungan, pengayoman, bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat serta terpercaya dalam memelihara kamtibmas dan penegakan hukum.

³ *Ibid.* hal. 315.

⁴ *Wawancara* dengan Slamet B.S, di Padang tanggal 13 Januari 2012.

1. Ka. SPN

Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan atau kelebihan disatu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Pimpinan merupakan salah satu unsur bagian yang terpenting dalam suatu struktur organisasi maupun lembaga, bagaimana jalannya organisasi tersebut sangat berkaitan erat sekali dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan guna kelangsungan jalannya suatu organisasi tersebut.⁵

Pemimpin atau pimpinan sangatlah dibutuhkan oleh sebuah organisasi maupun lembaga. Hal ini dikarenakan apabila organisasi atau lembaga ini tidak dipimpin oleh seseorang yang memiliki kelebihan dan kemampuan maka organisasi atau lembaga ini tidak akan berjalan dengan baik. Begitu juga halnya dengan Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi yang membutuhkan pemimpin untuk menjalankannya. SPN Padang Besi dipimpin oleh Kepala Sekolah (Ka SPN). Untuk dapat memangku jabatan sebagai Ka SPN haruslah memiliki keahlian dan kelebihan khususnya pernah menjabat sebagai Kapolres diwilayah Indonesia, memiliki prestasi dan mempunyai keahlian diberbagai bidang seperti PA Lantas, Sus Bintel ABRI, Das Pa Brimob, dan lain-lain. SPN Padang Besi selama periode 1961-1966 telah dipimpin oleh 2 Kepala SPN yaitu Kopol TK.II R. Moch Mulyo dengan masa jabatan 1961-1965 dan Kopol TK.II R. Hadi Pangentoe masa jabatan 1965-1967.

⁵ A.Budiarto.*Pimpinan dan Kepimpinan* (Jakarta:LP3ES, 1987), hal .4.

Pada tahun 1961-1965 Ka SPN Padang Besi yang pertama dijabat oleh Komisaris Polisi Tingkat II (sekarang setingkat dengan Ajun Komisaris Besar Polisi) R. Moch. Mulyo. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian RI. Np.Pol:27/SK/MK/1963 tanggal 16 Mei 1963 seluruh SPN dirubah namanya menjadi SAK (Sekolah Akademi Polisi) dimana SPN Cabang Padang Besi dirubah menjadi SAK Cabang Padang Besi. Demikian juga dengan sebuhan Kepala SPN dirubah menjadi Kepala SAK. Pada tahun 1964 berdasarkan Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian No.Pol:42/SK/MK/1964 tanggal 11 Agustus 1964 seluruh SAK dirubah kembali nama dan statusnya menjadi Depot Pendidikan dan Latihan (Deplat) sedangkan nama Kepala SAK dirubah menjadi Komandan Deplat.⁶

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Kepala SPN juga dibantu oleh para staf di SPN yang terdiri dari:

“Sektetariat Lembaga disingkat Setlem, bertugas menyelenggarakan penyusunan termasuk pengendalian dan analisa evaluasi pelaksanaan program kerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran, urusan administrasi personel dan logistik, serta urusan dalam, yang meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan markas dan manase.
Bagian Pengajaran dan Pelatihan disingkat Bagjarlat, bertugas menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang meliputi penyiapan perencanaan pengendalian pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaannya.
Korps Siswa disingkat Korsis, bertugas menyelenggarakan pembinaan kepribadian dan pengasuhan siswa dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
Tenaga Pendidik atau Instruktur disingkat Gadik atau Instruktur, bertugas melaksanakan pengajaran & pelatihan termasuk penyiapan rencana pengajaran dan pelatihan dalam bentuk Tugas Instruksional Umum (TIU) dan Tugas Instruksional Khusus (TIK) operasional pendidikan.”⁷

Komisaris Polisi Tingkat II R.Moch.Mulyo bertanggungjawab langsung kepada Kapolda Komisaris Besar Polisi Drs. Soebroto Brotodiredjo. Sebelum menjabat sebagai Ka SPN, R.Moch.Mulyo bertugas di bagian Bapedda Sumatera

⁶ Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi, *24 Tahun Pengabdian Dodiklat Padang Besi*, (Padang : Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi,1985), hal 45.

⁷ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 22 Tahun 2010 pasal 239.

Barat. Pada saat berdirinya SPN Padang Besi Kapolda menunjuk Komisaris Polisi Tingkat II R.Moch.Mulyo menjabat sebagai Ka SPN dari tahun 1961-1965. Sebagaimana halnya sekolah yang baru berdiri dalam hal ini SPN Padang Besi, banyak hal-hal yang belum terpenuhi dalam menunjang kelancaran proses belajar mengajar, misalnya sarana dan prasana yang belum memadai. Salah satu yang menjadi permasalahan dalam kepemimpinan Komisaris Polisi Tingkat II R. Moch. Mulyo adalah belum tersedianya ruang belajar sendiri yang memadai guna kelancaran proses belajar mengajar. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dijadikanlah garase dan rumah sakit sebagai tempat belajar.⁸

Setelah periode kepemimpinan R.Moch Mulyo, pada tahun 1965 SPN Padang Besi dipimpin oleh Komisaris Polisi Tingkat II oleh R.Hadi Pangentoe. Sebelum menjabat sebagai Ka SPN Padang Besi, Komisaris Polisi Tingkat II R.Hadi Pangentoe bertugas sebagai staf di Lemdik Polri, dan pada tahun 1965 beliau ditunjuk untuk menggantikan R. Moch. Mulyo menjadi Ka SPN yang baru dengan masa jabatan 1965-1967. Pada masa kepemimpinan Komandan Deplat R.Hadi Pangentoe, fasilitas, sarana dan prasarana untuk pendidikan siswa telah selesai dibangun dan dapat digunakan dengan layak.⁹

2. Instruktur

Sebagai suatu organisasi pendidikan Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi maka tenaga instruktur mempunyai peranan yang penting untuk menciptakan lulusan agen polisi yang berkualitas, disiplin, bermoral, dan cakap dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut seiring dengan tujuan didirikan Sekolah Polisi

⁸ *Wawancara* dengan Slamet B.S, di Padang tanggal 10 November 2011.

⁹ *Wawancara* dengan Slamet B.S, di Padang tanggal 13 Januari 2012.

Negara yang hasil didikannya bertugas memelihara keamanan di dalam negeri dan menjunjung hak-hak azazi rakyat dan hukum negara.

Pada awal pendidikan di SPN Padang Besi, para staf pengajar atau instruktur berasal dari pusat (Mabes Polri) ini dikarenakan jumlah polisi di SPN Padang Besi masih sangat sedikit dan para personilnya pun belum mempunyai kemampuan untuk mengajar para siswa. Adapun instruktur yang melatih agen polisi SPN Padang Besi antara lain Inspektur Polisi Tkt.II Zubir Radjo Intan, Inspektur Polisi Tkt.II Rusli, Inspektur Polisi Tkt. II Muhadi, Inspektur Polisi Tkt.II Sukardi, Ajunct Inspektur Polisi Tkt.I Arifin Sainang, Ajunct Inspektur Polisi Tkt.II Kosim, Brigadir Polisi M. Jasi, Brigadir Polisi Yuliyar, Brigadir Polisi Anas, Ajunct Brigadir Polisi Abizar Amir, Ajunct Brigadir Polisi Hasan Basri Kutje, Ajunct Brigadir Machmud Saleh, Ajunct Polisi Rusli¹⁰.

Instruktur yang mengajar di SPN Padang Besi sebagian dari mereka merupakan lulusan dari Akademi Polisi (AKPOL) dan mereka juga ikut sekolah khusus instruktur di Sukabumi. Untuk menjadi seorang instruktur haruslah mempunyai keahlian diberbagai bidang seperti menembak, beladiri, PBB, selain mendapat gaji, instruktur juga diberi fasilitas berupa rumah dinas dan penambahan uang saku sesuai dengan jumlah mata pelajaran yang mereka pegang. Sebagai seorang tenaga pengajar mereka mampu mendidik para agen polisi agar menjadi insan polri yang berkualitas.

3. Siswa dan Alumni

Awal dibukanya Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi diadakanlah perekrutan calon siswa agen polisi yang diambil dari tamatan serendah-rendahnya

¹⁰ Sekolah SPN Padang Besi, *op. cit.*, hal. 43.

Sekolah Rakyat (SR). Pada waktu itu kondisi Sumatera Barat belum begitu stabil akibat dari pergolakan yang terjadi, maka dari itu diutamakan calon agen polisi berasal dari Sumatera Barat. Seleksi penerimaan calon siswa agen polisi dilaksanakan panitia yang dibentuk oleh kepolisian daerah. Seleksi tersebut antara lain meliputi : bahasa indonesia, pengetahuan umum, olahraga, dan kesehatan.¹¹

Setelah diadakan seleksi, yang lulus menjadi siswa agen polisi sebanyak 240 siswa. Bagi yang lulus segera dikirim ke SPN Padang Besi dan diasramakan selama masa pelatihan. Setelah 6 bulan pelatihan siswa agen polisi angkatan I diluluskan dan dilantik pada tanggal 15 Januari 1963 sebanyak 239 siswa 1 siswa tidak lulus dikarenakan siswa tersebut kabur pada saat pendidikan. Lulusan agen polisi ini berpangkat AP II setingkat dengan tamtama. Sebanyak 25 siswa lulusan agen polisi langsung ditempatkan dan ditugaskan di SPN Padang Besi sedangkan yang lainnya mulai mengisi kekosongan-kekosongan tenaga dikesatuan kewilayahan.¹²

Pada tahun berikutnya 1962, 1963, 1964, 1965, dan 1966 juga diadakan penerimaan calon Agen Polisi karena jumlah agen polisi masih dirasakan sangat kurang, seleksi penerimaan tes ini sama seperti dengan angkatan pertama. Pada tahun 1962- 1966 penerimaan calon agen polisi juga masih berjumlah 240 siswa.

Tabel I

Jumlah Siswa Polisi Sekolah Polisi Negara (SPN) Cabang Padang Besi 1961-1966

NO	Tahun	Jumlah Siswa	Lulus (siswa)	Tidak Lulus (siswa)
----	-------	--------------	---------------	----------------------

¹¹ Wawancara dengan Syarbaini, di Padang tanggal 10 November 2011.

¹² Sekolah SPN Padang Besi, *op. cit.*, hal. 44

1	1961	240	239	1
2	1962	240	232	8
3	1963	240	240	-
4	1964	240	240	-
5	1965	240	240	-
6	1966	240	240	-
	Jumlah	1440	1431	9

Sumber: Data Siswa Agen Polisi 1961-1966

Dari tahun 1961-1966 Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi seharusnya meluluskan sebanyak 1440 siswa, tapi karena pada tahun 1961 hanya 1 siswa yang tidak lulus bernama Kahar dikarenakan kabur pada saat masih dalam masa pendidikan, sedangkan pada tahun 1962 sebanyak 8 siswa tidak diluluskan disebabkan tidak mentaati peraturan yang telah disepakati, selama pendidikan beberapa diantara mereka ada yang terlibat perkelahian. Diantara siswa tersebut ialah Syahrir, Ali, Muhidin, Djamal dan Yusup. Selama Orde Lama ini SPN Padang Besi telah meluluskan sebanyak 1431 agen polisi.¹³ Lulusan agen polisi ini diharapkan dapat mengisi kekosongan agen polisi yang kurang di berbagai wilayah di Sumatera Barat. Adapun beberapa pensiunan agen polisi antara lain : Serma Slamet B.S, Letkol Pol Darwin, Mayor Pol M. Nursaan, Letkol Maat Achin.

¹³ Sekolah SPN Padang Besi, *op. cit.*, hal. 77.

4. Kurikulum

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan bahan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Tahun 1961-1966 SPN Cabang Padang Besi memakai kurikulum pendidikan yang sama dengan SPN-SPN yang ada di Indonesia. Pada tahun 1961-1966 siswa agen polisi belum mendapat pendidikan dan pelatihan militer seutuhnya. Kurikulum yang diberikan pun belum terstruktur hal ini dikarenakan mereka masih mempelajari pendidikan mengenai tugas polisi secara umum¹⁴.

Pendidikan Kepolisian diseragamkan dengan pendidikan angkatan darat sebagai acuannya. Pendidikan yang diperuntukan bagi polisi lebih ditekankan pada Pendidikan Pembentukan. Pendidikan Pembentukan adalah Pendidikan yang dilakukan untuk membentuk kepribadian atau mental dan membekali pengetahuan dan keterampilan Dasar Kepolisian yang diperlukan sesuai dengan perannya sebagai agent polisi atau tamtama. Untuk itu diberikan 2 bulan pendidikan dalam mendapatkan kemampuan dasarnya yaitu pendidikan Dasar Keprajuritan, setelah mengikuti pendidikan Dasar Keprajuritan dilanjutkan dengan pendidikan selama 4 bulan untuk mengikuti pendidikan Kemampuan Tujuan Umum. Siswa dididik selama 6 bulan dan lulusan ini diharapkan mampu berkompetensi dalam melakukan Tugas Umum Kepolisian/ Sabhara.¹⁵

Mata pelajaran yang diajarkan kepada siswa agen polisi periode pertama ini lebih ditekankan pada tugas polisi umum. Berikut nama mata pelajaran yang diajarkan pada siswa agen polisi yaitu: tugas polisi umum, hukum pidana, proses-

¹⁴ Wawancara dengan Zulkarnaini, di Padang tanggal 4 Januari 2012.

¹⁵ Wawancara dengan Zulkarnaini, di Padang tanggal 4 Januari 2012.

verbal, kewajiban pertama ditempat kejadian perkara, peraturan-peraturan dinas, pekerjaan di lapangan, pertolongan pertama pada waktu ada kecelakaan dan membalut (P3K), baris-berbaris, bahasa Indonesia, teknik motor dan mengemudi semua kendaraan bermotor, budi pekerti, olahraga, beladiri, persenjataan dan menembak¹⁶

Kegiatan yang diwajibkan bagi siswa agen polisi adalah latihan fisik dan belajar di kelas. Latihan fisik merupakan latihan yang wajib dilakukan oleh siswa setiap hari, latihan dimulai dari bangun tidur hingga malam. Kegiatan sehari-hari dimulai dari bangun pagi jam 05.00 dilanjutkan dengan shalat subuh berjamaah, selesai shalat subuh siswa mengikuti lagi pagi mengelilingi SPN Padang Besi, bahkan sampai ke Bukit Karang Putih dan kembali ke SPN hingga jam 07.00 dan diperbolehkan untuk mandi, karena masa ini fasilitas untuk mandi tidak mencukupi untuk semua siswa maka sebagian dari mereka mandi disungai, hingga jam 08.00 siswa melaksanakan makan pagi dengan menu seadanya seperti bubur, pisang dan ubi rebus. Selesai makan pagi siswa melaksanakan apel pagi dengan semua personil SPN Padang Besi dan dimulailah kegiatan belajar mengajar siswa hingga istirahat jam 13.00, melaksanakan sholat berjamaah dan makan siang. Menu makan siang sangat sederhana dengan nasi putih, tempe, tahu dan telur dalam porsi kecil, dalam hitungan 10 (sepuluh) semua makanan harus dihabiskan tanpa sisa, kalau ada yang tersisa maka siswa dihukum dengan cara berlari keliling SPN dan harus menghabiskan makanan itu kembali. Tidak sedikit siswa

¹⁶ *Wawancara* Ragat Sirait, di Padang tanggal 8 Januari 2012.

yang memasukan makanan mereka kedalam baju agar tidak ketahuan oleh instruktur.¹⁷

Setelah istirahat maka kegiatan belajar kembali dilaksanakan hingga jam 17.00 siswa diperbolehkan istirahat melaksanakan shalat magrib berjamaah dilanjutkan dengan makan malam dengan menu nasi dan lauk pauk seadanya seperti daging dan telur tapi masih dengan porsi kecil, tidak jarang nasi yang didapat dicampur dengan jagung, hal ini dikarenakan kondisi ekonomi Sumatera Barat masih kacau dimana semua harga sembako mahal. Selesai makan malam siswa melaksanakan apel malam jam 21.00 setelah itu kembali belajar hingga jam 23.00 siswa istirahat untuk tidur.¹⁸

Selama pendidikan siswa harus mengikuti semua kegiatan yang telah dijadwalkan kecuali dalam keadaan sakit, dalam mengikuti pendidikan siswa harus fokus dalam mengikuti arahan instruktur apabila ada siswa yang melakukan kesalahan maka akan dapat hukuman sesuai dengan perintah instruktur, hukuman yang diberikan lebih bersifat melatih fisik siswa seperti lari, push up, sit up, dll. Kegiatan belajar dilaksanakan setiap hari kecuali pada hari Minggu. Waktu belajar dikelas disesuaikan dengan jadwal yang telah diatur oleh instruktur. Sedangkan hari Minggu merupakan hari libur bagi siswa, setelah melaksanakan apel pagi siswa diperbolehkan untuk melakukan kegiatan bebas. Pada hari Minggu tersebut dimanfaatkan siswa untuk istirahat, selama 2 bulan pendidikan mereka belum diperbolehkan untuk pulang ke rumah.¹⁹

¹⁷ Wawancara dengan Slamet B.S, di Padang tanggal 13 Januari 2012.

¹⁸ Wawancara dengan Slamet B.S, di Padang tanggal 13 Januari 2012.

¹⁹ Wawancara dengan Ragat Sirait, di Padang tanggal 8 Januari 2012.

5. Sarana, dan Prasarana di SPN

Dalam menempuh pendidikan di Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi para siswa mendapatkan berbagai macam fasilitas, sarana, dan prasarana yang disediakan oleh pihak sekolah untuk menunjang pendidikan. Lahan seluas 17,4 ha dimanfaatkan oleh pihak sekolah untuk membangun sarana dan prasarana bagi siswa. Pada tahun 1961-1966 pihak SPN telah membangun gedung-gedung sebagai sarana dan prasarana seperti:²⁰

a) Gedung Utama

Gedung Utama dibangun seluas 1.190 M², gedung ini digunakan sebagai kantor utama yang terdiri dari ruang Ka SPN, Waka SPN, Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), Subbagian Pelayanan Markas (Subbagyanma), Unit Provos, Bagian Pengajaran dan Pelatihan (Bagjarlat), Korps Siswa (Korsis), Tenaga Pendidik dan Instruktur (Gadik) dan Tata Usaha.

b) Barak siswa

Pada tahun 1961-1966 barak siswa berjumlah 6 buah seluas 8000 M², barak ini digunakan sebagai ruang tidur siswa yang terdiri dari kasur dan lemari pakaian, 1 barak diisi oleh 40 siswa.

c) Gedung olahraga

Gedung olahraga digunakan sebagai tempat latihan beladiri, judo, tinju. Gedung ini dibangun diatas lahan seluas 1.200 M².

d) Rumah Dinas

Rumah dinas Ka SPN, Waka SPN, serta rumah dinas untuk para pelatih serta staf pengajar di SPN. Rumah dinas ini terdiri dari type 130 berjumlah 2

²⁰ Wawancara dengan Slamet B.S, di Padang tanggal 13 Januari 2012.

pintu, type 54 berjumlah 3 pintu, type 45 berjumlah 2 pintu , type 38 berjumlah 6 pintu, dan type 27 berjumlah 8. Rumah ini ditempati sesuai dengan pangkat tertinggi hingga terendah.

e) Ruang makan

Pada tahun 1961-1966 ruang makan terdiri dari 1 unit dengan luas 500M².

f) Garase mobil

Garase mobil digunakan untuk tempat mobil dinas, mobil patroli. Sebelum pembangunan ruang belajar selesai, siswa menggunakan garase sebagai tempat belajar. Garase terdiri dari 1 unit dengan luas 320M².

g) Rumah sakit

Rumah sakit terdiri dari 1 unit dibangun diatas tanah seluas 400M².²¹ Rumah sakit ini digunakan untuk merawat siswa dan staf yang sakit.

h) Lapangan Upacara

Lapangan upacara seluas 8000M², lapangan ini digunakan untuk upacara bendera setiap hari Senin.

i) Lapangan Tembak

Lapangan tembak terdiri dari 1 unit seluas 8000M², lapangan ini digunakan untuk latihan menembak senjata.

j) Lapangan Apel Siswa

Lapangan seluas 5000m² digunakan untuk apel pagi, siang dan malam, lapangan ini digunakan selama pendidikan.

k) Lapangan Hitam

²¹ Wawancara dengan Maat Achin, di Padang tanggal 2 Januari 2012.

Lapangan Hitam ini digunakan untuk latihan PBB, lapangan ini seluas 6000M².

Fasilitas lainnya yang diberikan oleh Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi terhadap para siswa yaitu pakaian seragam yang diberi secara cuma-cuma karena pakaian ini didatangkan langsung dari pusat (Mabes polri) yaitu berupa pakaian dinas lapangan, pakaian dinas umum, dan olahraga.

B. SPN Masa Orde Baru (1966-1998)

1. Ka SPN

Pada awal masa Orde Baru tahun 1966 Deplat masih dipimpin oleh Komisaris Polisi Tingkat II R.Hadi Pangentoe. Setelah masa jabatan Komisaris Polisi Tingkat II R.Hadi Pangentoe berakhir tahun 1967, beliau digantikan oleh Komisaris Polisi Tingkat II Aminoeddin Jacub (1967-1974). Sebelum menjabat sebagai Ka SPN sebelumnya beliau bertugas di Polda Metro Jaya, pada awal masa Jabatan Komisaris Polisi Tingkat II Aminoeddin Jacub terdapat kekosongan kegiatan utama di Deplat Padang Besi. Hal ini dikarenakan berhubung situasi negara dalam peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru. Pada masa peralihan ini Kepolisian Negara masuk kedalam tubuh ABRI sehingga pendidikan dan pangkat polisi disamakan dengan TNI-AD.²²

Pada tahun 1971 berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: 41/SK/Kapolri/1971 Deplat dirubah menjadi Dodiklat (Depo Pendidikan dan Latihan) demikian pula sebutan Komandan Deplat berubah menjadi Kepala

²² *Wawancara* dengan Maat Achin, di Padang tanggal 2 Januari 2012.

Dodiklat.²³ Masa jabatan Komisariss Polisi Tingkat II Aminoeddin Jacub berakhir tahun 1974 beliau merupakan pemimpin yang lama menjabat di Dodiklat selama 7 tahun. Komisariss Polisi Tingkat II Aminoeddin Jacub digantikan Mayor Pol Soeparno Edhi (1974-1978). Selama pimpinan Soeparno Edhi banyak perubahan yang terjadi di Dodiklat Padang Besi yaitu sarana dan prasarana yang telah memadai dan ruangan belajar beserta alat-alatnya telah lengkap.

Mayor Pol Soeparno Edhi memimpin Dodiklat selama 4 tahun dan pada tahun 1978 jabatan beliau digantikan oleh Mayor Pol Adnin Riva'i yang sebelumnya Mayor Pol Adnin Riva'i pernah menjabat sebagai Komandan Dodiklat di Dodiklat Sampali. Jabatan beliau sangat singkat hanya berselang selama 1 tahun (1978-1979). Selama Mayor Pol Adnin Riva'i menjabat Kepala Dodiklat, beliau hanya melanjutkan sistem pendidikan yang telah ada sebelumnya. Setelah masa jabatan Mayor Pol Adnin Riva'i berakhir, beliau dipindahtugaskan ke Mabes Polri bagian Korps Lalu Lintas dan jabatan beliau digantikan Letkol Pol Amiruddin (1979-1981). Selama masa kepemimpinan Letkol Pol Amiruddin, beliau banyak penambahan sarana dan prasarana untuk pendidikan, seperti penambahan jumlah barak siswa sebanyak 9 barak, ruang makan 2 unit, dan penambahan rumah dinas.²⁴

Setelah periode kepemimpinan Letkol Pol Amiruddin, pada tahun (1982-1983) Dodiklat Padang Besi dipimpin oleh Letkol Pol. Nana Permana. Selama masa jabatan beliau tidak banyak terjadi perubahan baik dari segi pendidikan maupun sarana dan prasarana di Dodiklat Padang Besi, beliau dikenal dengan sikap disiplinnya yang dapat dijadikan contoh bagi staf yang lain. Masa

²³ Sekolah SPN Padang Besi, *op. cit.*, hal. 48.

²⁴ *Wawancara* dengan Syamsul Bahri, di Padang tanggal 15 Januari 2012.

kepemimpinan beliau sangat singkat hanya berselang 1 tahun karena beliau dipindah tugaskan ke Polda Jawa Barat. Tahun 1983 beliau menyerahkan jabatan kepada penggantinya yaitu Letkol Pol Darwin (1983-1985). Letkol Pol Darwin bukanlah orang baru di SPN Padang Besi beliau merupakan siswa agen polisi angkatan I di SPN Padang Besi dimana sebelumnya beliau bertugas di Polda Aceh dan beliau diberi kesempatan untuk mengabdikan kepada almamaternya.²⁵

Pada masa kepemimpinan Letkol Pol Darwin tahun 1985 terjadi perubahan nama Dodiklat yang berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol. Skep/07/VII/1985 dimana Dodiklat dirubah lagi seperti saat berdirinya menjadi Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi dibawah Dit Diklat Polda, dan sebutan Kepala Dodiklat berubah juga menjadi Kepala SPN (Ka SPN).²⁶ Tidak lama setelah perubahan nama Dodiklat, Letkol Pol Darwin menyerahkan jabatannya kepada Letkol Pol Soewardi.

Letkol Pol Soewardi memegang jabatan Ka SPN terhitung mulai tahun 1985-1990. Sebelum menjabat Ka SPN beliau merupakan Kapolres Sijunjung pada tahun 1984 dan beliau ditugaskan menggantikan Letkol Pol Darwin sebagai Ka SPN. Pada masa jabatannya, beliau kembali menambah fasilitas guna menunjang pendidikan seperti dibangunnya lapangan basket, kantin, dan tempat cukur siswa. Beliau merupakan sosok pemimpin yang dihormati oleh staf maupun siswa SPN, beliau akrab dengan siswa sebagai orang tua, beliau memiliki rasa humor, tapi kalau berada di lapangan beliau merupakan sosok yang sangat disiplin.²⁷

²⁵ Wawancara dengan Syamsul Bahri, di Padang tanggal 15 Januari 2012.

²⁶ Sekolah SPN Padang Besi, *op. cit.*, hal. 45.

²⁷ Wawancara dengan Sadrinal, di Padang tanggal 20 Januari 2012.

Pada tahun 1990, masa jabatan Letkol Pol Soewardi sebagai Ka SPN berakhir dan beliau menyerahkan jabatannya kepada Letkol Pol W.P Nainggolan yang sebelumnya bertugas sebagai Kapolres Medan dan ditunjuk untuk menggantikan jabatan Letkol Pol Soewardi selaku Ka SPN Padang Besi. Selama menjabat sebagai Ka SPN Padang Besi, beliau merupakan sosok yang keras, dan disiplin dalam latihan, tidak jarang beliau sendiri yang melatih para siswa di lapangan, beliau juga sering memberikan pelajaran dikelas.²⁸ Masa kepemimpinan beliau hanya berjalan selama tiga tahun, dan beliau ditugaskan kembali ke Medan sebagai Ka SPN Sampali. Tahun 1993 beliau menyerahkan jabatannya kepada Letkol Pol Buchoding.

Letkol Pol Buchoding menjabat sebagai Ka SPN Padang Besi pada tahun 1993 menggantikan Letkol Pol Soewardi. Sebelum menjabat Ka SPN Padang Besi, Letkol Pol Buchoding menjabat sebagai Kapolsek Setia Budi, Sukabumi. Sama halnya dengan para pemimpin Ka SPN sebelumnya, Letkol Pol Buchoding juga merupakan pemimpin yang tegas dan disiplin dalam bekerja maupun dalam memberikan pendidikan kepada siswanya, sifatnya yang keras membuat beliau disegani oleh para siswa maupun para staf di SPN Padang Besi. Letkol Pol Buchoding menjabat sebagai Ka SPN terhitung hanya satu tahun, selama satu tahun kepemimpinannya beliau tidak melakukan perubahan apa-apa terhadap sistem pendidikan.²⁹

Setelah periode kepemimpinan Ka SPN Letkol Pol Buchoding berakhir pada tahun 1994, beliau menyerahkan jabatannya kepada Ka SPN yang baru yaitu Letkol Pol Wan Norman, diantara Ka SPN sebelumnya hanya Letkol Pol Wan

²⁸ Wawancara dengan Sadrinal, di Padang tanggal 20 Januari 2012.

²⁹ Wawancara dengan Himsar Siregar, di Padang tanggal 25 Januari 2012

Norman yang menjabat sangat singkat hanya beberapa bulan, hal ini dikarenakan Letkol Pol Wan Norman bunuh diri dengan menembakan kepalanya sendiri, yang dikarenakan sakit yang diderita beliau tidak kunjung sembuh, sehingga pada tahun yang sama 1994 jabatan Ka SPN yang baru diserahkan kepada Letkol Pol Dinar. Pada tahun 1994 Letkol Pol Dinar mulai memimpin SPN Padang Besi terhitung tahun 1994-1997.³⁰

Periode kepemimpinan Ka SPN Letkol Pol Dinar dimulai pada tahun 1994, beliau merupakan sosok pemimpin yang dikenal dengan pribadi yang keras dan disiplin. Walaupun memiliki pribadi yang keras tapi beliau juga dikenal dengan pribadi yang taat dalam menjalankan ibadah, beliau juga yang menambha fasilitas mesjid di lingkungan SPN, tidak jarang beliau juga ikut beribadah dengan siswa dan staf yang lain. Masa kepemimpinan beliau berakhir pada tahun 1997 dan beliau digantikan oleh AKBP Drs. Rusli Lubis terhitung dari tahun 1997-2001.³¹

2. Instruktur

Instruktur bertugas sebagai seorang pendidik dan pengasuh dimana tugas pokoknya adalah mendewasakan siswanya baik secara mental, intelek dan fisik. Instruktur atau staf pengajar Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi pada masa Orde Baru mengalami perubahan, pada periode Orde Lama (1961-1966) para instruktur SPN didatangkan dari Sukabumi. Berhubung pada masa Orde Baru ada perubahan dalam sistem pendidikan, dimana pendidikan untuk siswa disamakan dengan pendidikan militer maka para instruktur SPN Padang Besi juga dilatih pendidikan militer sebelum diajarkan kepada siswa. Beberapa instruktur SPN

³⁰ *Wawancara* dengan Himsar Siregar, di Padang tanggal 25 Januari 2012.

³¹ *Wawancara* dengan Himsar Siregar, di Padang tanggal 25 Januari 2012.

Padang Besi dikirim ke Sukabumi untuk dilatih dan dididik, adapun para instruktur yang dikirim adalah: Ajun Brigadir Polisi Robert Malao, Ajun Brigadir Polisi Satu Hasigen, Ajun Brigadir Polisi Badar, Ajun Brigadir Polisi M. Ulir, dan Ajun Brigadir Polisi Dua M.Nasution.³²

Para instruktur yang dikirim ke Sukabumi mendapat pelatihan selama 3 bulan di Sukabumi yang nantinya dapat sertifikat mengajar di SPN, para instruktur kembali ke SPN dan mengajarkan apa yang mereka dapatkan selama pelatihan di Sukabumi, apabila instruktur mendapat latihan yang keras, maka siswa akan mendapat latihan yang keras juga. Latihan yang disamakan dengan ABRI bertujuan selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa pergolakan daerah, Polri juga terlibat di berbagai operasi militer bersama-sama kesatuan bersenjata yang lain. Keadaan seperti ini dilakukan oleh Polri karena Polri lahir sebagai satu-satunya kesatuan bersenjata yang relatif lebih lengkap.

Selain beberapa instruktur yang disekolahkan di Sukabumi, seluruh personel baik bintanga maupun perwira di SPN Padang Besi juga mengikuti pelatihan (training) yang diadakan di SPN. Pelatihan yang diadakan berupa *master trainer* dan master instruktur yang dilatih oleh para instruktur ICITAP yang berasal dari Amerika dibawah Departemen Kehakiman Amerika. Pelatihan yang diajarkan lebih bersifat kepada SSMKD (Standar Sistem Keamanan Darurat) tujuan diadakan pelatihan ini untuk meningkatkan kualitas siswa didik SPN Padang Besi. Beberapa bintanga dan perwira instruktur yang mengikuti pelatihan ini antara lain: Kapten Pol Fauzy Cosla, Kapten Pol Murtif, Lettu Pol Syamsul Bahri, Letda Pol Himsar Siregar, Serma Faisal, Serma Maat Achin, Serma Slamet

³² Wawancara dengan Maat Achin, di Padang tanggal 2 Januari 2012.

B.S, Sertu Sumintak. Pelatihan keras yang didapat para instruktur selama mengikuti pelatihan disertai dengan kurikulum yang berbau militer yang menuntut siswa SPN Padang Besi mendapat latihan yang keras juga.³³

3. Siswa dan Alumni

Pada awal periode Orde Baru (1966-1998) siswa SPN mengalami penurunan, hal ini dikarenakan masa transisi dari perpindahan Orde Lama menuju Orde Baru, pada tahun 1967-1970 SPN mengalami kekosongan dalam kegiatan utamanya. Tahun 1970 Dodiklat Padang Besi kembali menerima siswa sebanyak 120 orang. Hingga pada tahun 1998 jumlah siswa yang diterima ada yang mengalami peningkatan dan penurunan. Sedikit banyaknya siswa yang diterima tergantung dari kebijaksanaan pimpinan Polri, karena perekrutan anggota dilandasi oleh kebutuhan personil ditingkat wilayah.

Hingga pada tahun 1998 jumlah siswa yang dididik di SPN Padang Besi sebanyak 6018 siswa, sedangkan yang lulus 5966 siswa dan tidak lulus 52 siswa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini;

Tabel II

Jumlah Siswa Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi
1970-1998

no	Tahun	Jumlah siswa	Lulus (siswa)	Tidak lulus (siswa)
1	1970/1971	120	118	2
2	1974/1975	100	100	-
3	1974/1975	240	240	-
4	1975/1976	240	231	9

³³ Wawancara dengan Himsar Siregar, di Padang tanggal 15 April 2012.

5	1976/1977	280	280	-
6	1976/1977	290	290	-
7	1977/1978	300	299	1
8	1977/1978	210	205	5
9	1978/1979	235	230	5
10	1978/1979	300	300	-
11	1978/1979	220	220	-
12	1979/1980	220	218	2
13	1979/1980	100	92	8
14	1980	50	50	-
15	1980/1981	50	48	2
16	1981/1982	100	100	-
17	1981/1982	100	100	-
18	1983/1984	200	195	5
19	1984/1985	321	321	-
20	1985/1986	197	197	-
21	1986/1987	75	75	-
22	1987/1988	250	247	3
23	1988/1989	220	216	4
24	1989/1990	150	150	-
25	1991/1992	100	100	-
26	1992/1993	180	179	1
27	1993/1994	179	176	3
28	1994/1995	194	194	-
29	1995/1996	197	196	1
30	1996/1997	330	329	1
30	1997/1998	270	270	-
	Jumlah	6018	5966	52

Sumber : Data Siswa SPN Padang Besi 1970-1998

Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi selama periode 1967-1998 seharusnya telah meluluskan sebanyak 5966 siswa polisi, dan sebanyak 52 siswa

tidak diluluskan hal ini dikarenakan berbagai faktor yaitu beberapa siswa yang memiliki mental yang lemah sehingga tidak cocok untuk menjadi seorang prajurit, diantara siswa ada yang melarikan diri karena tidak tahan dengan pendidikan militer yang sangat keras, sakit, dan juga yang meninggal karena sakit saat mengikuti pendidikan. Tahun 1970 seorang siswa bernama Muis tidak dapat dilantik menjadi anggota Polri dikarenakan dipecat, tahun 1975 sebanyak 9 orang siswa diantaranya Asrul, Kasman, Rustam, dan Yahyo tidak dilantik karena bermasalah dengan pihak SPN, tahun 1977 sebanyak 5 siswa tidak lulus, diantaranya Dalar, Chaidir, Asrul dipecat karena melarikan diri, sedangkan Yunaidi sakit. Tahun 1979 sebanyak 8 siswa dipecat karena tidak mentaati peraturan selama masa pendidikan diantaranya Aswir, Zainal dan Sumarto. Siswa hasil lulusan Orde Baru memakai pangkat yang sama dengan TNI-AD yaitu Serda (Sersan Dua)

Para alumni SPN Padang Besi ini telah mendedikasikan hidupnya untuk menjadi pelindung, penganyom masyarakat. Tidak sedikit pula alumni SPN Padang Besi yang mempunyai jabatan tinggi di instansi kepolisian terkait. Beberapa alumni SPN Padang Besi yang masih aktif bertugas antara lain : AKBP Syamsul Bahri, AKP Himsar Siregar, AKP Jonisman, AKP Marzan, AKP Sumintak.

4. Kurikulum

Kurikulum pendidikan yang diterapkan di Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi pada masa Orde Baru berbeda dengan pendidikan pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama kurikulum yang diberikan lebih fokus pada tugas polisi umum, kurikulum masa Orde Baru lebih terstruktur dan lama pendidikan

yang dijalani pun lebih lama yaitu selama 11 bulan, pendidikannya lebih ditekankan latihan militer, siswa tidak hanya dilatih untuk mengamankan masyarakat tapi juga dilatih untuk berperang. Tujuan dari Pendidikan ialah:

A. Membentuk dan mengembangkan personil yang memenuhi syarat tertentu dan terpilih untuk menjadi agent polisi atau tamtama yang memiliki sikap dan perilaku sebagai prajurit polri yang berjiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta berkode Etik Polri.

B. Membekali ketrampilan dan pengetahuan tekhnis maupun taktis profesional Kepolisian agar mampu melaksanakan tugas Umum Kepolisian.

Sedangkan Materi ajaran terdiri dari :

1. Tahap Pertama adalah tahap Dasrit, yaitu proses pendidikan yang menitik beratkan agar para peserta didik memperoleh kecakapan praktis dan keterampilan dasar keprajuritan umum ABRI
2. Tahap Das Gol adalah tahap pembekalan pengetahuan dan keterampilan tekhnis maupun taktis professional kepolisian agar mampu melaksanakan tugas sebagai agent polisi atau tamtama.
3. Tahap Das Gol Lan adalah tahap pembekalan profesi agar para peserta didik memiliki kemampuan tugas umum kepolisian.
4. Tahap Pembulatan Dik adalah tahap pembulatan pendidikan yang merupakan aplikasi tekhnik umum kepolisian.³⁴

Sistem pendidikan yang diterapkan hampir sama dengan pada masa Orde Lama yaitu dimana siswa diwajibkan untuk mengikuti semua mata pelajaran yang telah ditetapkan, mata pelajaran yang telah dipelajari akan diuji dan dinilai. Untuk

³⁴ Sumber dari *Kurikulum* tahun 1994. Untuk lebih jelas lihat pada lampiran Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/1018/VII/1994.

dapat mengikuti ujian, para siswa harus mengikuti 1000 jam pelajaran (jampel), tiap jampel dihitung selama 50 menit. Penilaian hasil pendidikan adalah suatu proses pengumpulan dan pelaporan data dibagi dengan hasil belajar, sikap mental/kepribadian dan kesamaptaan jasmani peseta didik. Semua kegiatan siswa juga hampir sama dengan masa Orde Baru, perbedaannya hanya terletak pada kegiatan dilapangan lebih padat apabila dibandingkan dengan kegiatan didalam kelas. Pendidikan keras militer yang diberikan instruktur memaksa siswa untuk mengikutinya, banyak siswa yang mencoba bertahan dengan pendidikan ini, tapi ada juga beberapa siswa selama periode ini yang tidak tahan dan menoba untuk kabur dengan cara memanjat tembok pembatas SPN, kalau ketahuan siswa tersebut akan dikenai sanksi. Siswa yang bermasalah dan sakit parah akan dikembalikan kepada keluarganya tanpa mendapatkan pangkat kepolisian.³⁵

5. Sarana, dan Prasarana di SPN

Pada masa Orde Baru 1966-1998 Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi telah mengalami peningkatan dalam hal fasilitas, sarana, dan prasarana untuk pendidikan siswa. Adapun penambahan fasilitas, sarana, dan prasarana untuk menunjang pendidikan yaitu:³⁶

a) Gedung olahraga

Gedung ini digunakan untuk olahraga didalam ruangan, seperti beladiri, silat. Gedung ini dibangun dengan luas 1200 M².

b) Toko Primkopol

Toko primkopol adalah koperasi yang bisa digunakan siswa untuk belanja keperluan yang dibutuhkan. Luas koperasi ini 138M².

³⁵ Wawancara dengan Syamsul Bahri, di Padang tanggal 20 Desember 2011.

³⁶ Wawancara dengan Syamsul Bahri, di Padang tanggal 20 Desember 2011.

C) Kelas kompi

Kelas kompi merupakan kelas belajar, kelas ini terdiri 4 unit, dibangun dengan luas tanah 320M².

d) Lapangan tembak senjata api

Lapangan ini diperuntukan bagi latihan untuk menggunakan senjata api panjang, luas lahan untuk lapangan tembak senjata api panjang ialah 8000M².

e) Gudang peluru Polda

Bangunan ini diperuntukan menyimpan peluru untuk Polda, luas bangunan untuk menyimpan peluru ialah 300 M²

F) Ruang pustaka

Ruang pustaka dibangun terdiri dari 1 unit dengan luas 80M².

C. SPN Masa Reformasi (1998-2002)

1. Ka SPN

Pada masa reformasi 1998, SPN Padang Besi masih dipimpin oleh AKBP Drs. Rusli Lubis. Pisahnya Polri dari ABRI juga berdampak terhadap pendidikan di SPN Padang Besi, hal merupakan tugas baru yang dihadapi oleh Ka SPN Rusli Lubis, Masa kepemimpinan AKBP Drs. Rusli Lubis, banyak terjadi perubahan di SPN dikarenakan terjadinya reformasi di Indonesia pada tahun 1998, reformasi juga berpengaruh terhadap perubahan yang terjadi di SPN. Terjadinya reorganisasi di tubuh ABRI sehingga sistem pendidikan SPN juga berubah. Ka SPN Rusli Lubis selaku pemimpin berusaha untuk menyesuaikan perubahan yang terjadi, tidak mudah bagi seorang Ka SPN Rusli Lubis untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam sistem organisasi, kepemimpinan, dan pendidikan di SPN, hal ini perlu diperbarui dan disesuaikan dengan kondisi perkembangan

zaman sehingga SPN tidak tertinggal oleh perkembangan zaman yang selalu memberikan tantangan yang berat.³⁷

Beliau berusaha untuk mengubah karakter militeristik bergeser ke karakter polisi sipil. Masa jabatan Ka SPN AKBP Drs. Rusli Lubis berakhir pada tahun 2001, beliau menyerahkan jabatannya pada Ka SPN yang baru yaitu AKBP Drs. Sugeng Heryanto.³⁸ Kepemimpinan Ka SPN AKBP Drs. Sugeng Heryanto dimulai pada tahun 2001-2004, selama memimpin SPN beliau dikenal dengan sosok yang disiplin, taat ibadah, bahkan beliau sering menjadi penceramah di mesjid SPN, beliau juga sangat memperhatikan siswa didiknya, bahkan beliau juga ikut serta dalam mengawas pendidikan siswa SPN Padang Besi, walaupun sistem pendidikan polisi tidak bersifat militer tapi masih ada juga beberapa instruktur yang memberi latihan yang keras pada siswa.³⁹ Tidak mudah bagi seorang Sugeng Heryanto dalam memimpin SPN pada awal era reformasi, dimana masyarakat sendiri sudah mulai tidak percaya pada anggota polisi, hal ini dikarenakan sikap arogan polisi pada masa Orde Baru menjadi pokok masalah.

2. Instruktur

Pada masa reformasi ini, para instruktur SPN Padang Besi juga mengalami perubahan terutama pada system pendidikan yang bersifat militer dihapuskan. Pendidikan yang diberikan kepada instruktur tetap sama seperti masa Orde Baru dimana beberapa bintang instruktur maupun perwira instruktur yang memiliki keahlian akan dikirim belajar di lemdik-lemdik Polri yaitu Sekolah Instruktur di Sukabumi, yang nantinya mereka akan mendapat sertifikat untuk izin mengajar di SPN. Sedangkan personil SPN Padang Besi yang lain mendapatkan pelatihan

³⁷ *Wawancara* dengan Jonisman, di Padang tanggal 29 Januari 2012

³⁸ *Wawancara* dengan Himsar Siregar, di Padang tanggal 23 Desember 2011.

³⁹ *Wawancara* dengan Himsar Siregar, di Padang tanggal 23 Desember 2011.

(training) yang diadakan di SPN Padang Besi yang tujuannya untuk meningkatkan sistem pengajaran yang tidak berbau militer, dimana lebih bersifat pada polisi sipil yang jauh dari sifat arogansi terhadap masyarakat.

Adapun beberapa instruktur yang mengajar di SPN Padang Besi periode 1998-2002 yaitu :Kapten Polisi Marwan Syukur, Lettu Pol Syamsul Bahri, Serma Faisal, Serka Gunawan, Serka Karnawi, Sertu Gusdi, Serma Afnidar, Sertu Irawan Sukma, Letda Simangusom, dan Lettu Taher.⁴⁰

Selama masa reformasi ini pihak SPN menghimbau semua instruktur agar mengurangi latihan fisik yang mengarah pada pendidikan militer, dimana kekerasan masih dipergunakan. Pada awal reformasi tahun 1998 instruktur masih menggunakan kekerasan dalam pendidikan, hal ini dikarenakan belum adanya Undang-undang secara resmi pisahnya Polri dari TNI, hingga tahun 2002 dengan adanya kurikulum baru maka instruktur mulai mengurangi kekerasan dalam pendidikan. Walaupun masih ada didapati beberapa instruktur yang menggunakan kekerasan dalam pendidikan, ini dikarenakan mental instruktur yang memberikan latihan yang bersifat militeristik belum dapat dihilangkan secara keseluruhan.⁴¹

Para instruktur dituntut agar mengurangi latihan fisik yang mengarah pada pendidikan militer, walaupun masih ada didapati beberapa instruktur yang menggunakan kekerasan dalam pendidikan, ini dikarenakan mental instruktur yang memberikan latihan masih bersifat militeristik.

3. Siswa dan Alumni

Tahun 1998-2002 jumlah penerimaan siswa SPN Padang Besi mengalami peningkatan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, ini dikarenakan

⁴⁰ Buku Kenang-Kenangan Semaba PK Polri 1998-1999.

⁴¹ *Wawancara* dengan Himsar Siregar, di Padang tanggal 23 Desember 2011.

kebutuhan polisi semakin meningkat. Adapun syarat penerimaan siswa yaitu: tinggi badan 165 cm .WNI yang dibuktikan KTP. Selanjutnya pendaftar minimal berada di wilayah provinsi tersebut (sesuai KTP), satu tahun. Pindahan provinsi lain yang kurang dari 1 tahun tidak bisa daftar, berijazah minimal SMA dan sederajat. Umur maksimal 22 tahun untuk lulusan SMA, belum pernah dipidana/berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Catatan Kepolisian (SKCK)⁴²

Pada tahun 1998 dikarenakan reformasi masa pendidikan polisi mengalami peningkatan karena jumlah polisi masih sangat dibutuhkan, hal ini diakibatkan masa peralihan Orde Baru ke Reformasi. Pada tahun 1998 siswa SPN mengalami peningkatan sebanyak 425 siswa, bahkan tahun 2000 dan 2002 SPN menerima siswa sebanyak 600 siswa yang merupakan gabungan dari Polda Lampung. Latihan gabungan yang dilaksanakan merupakan latihan yang bersifat nasional. Dimana siswa hasil didikannya ditugaskan untuk seluruh wilayah yang ada di Indonesia, bukan hanya di wilayah Sumatera Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini

Tabel III

Jumlah Siswa Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi

1998-2002

no	Tahun	Jumlah Siswa	Lulus (siswa)	Tidak lulus (siswa)
1	1998/1999	450	447	3
2	1998/1999	330	330	-

⁴² Wawancara dengan Joniter Darma, di Padang tanggal 18 Februari 2012

3	1999/2000	600	598	2
4	2000/2001	400	395	5
5	2000/2001	350	348	2
6	2001/2002	375	375	-
7	2002	600	599	1
	Jumlah	3105	3092	13

Sumber : Data Siswa SPN Padang Besi 1998-2002

Dari tahun 1998-2002 SPN Padang Besi telah mendidik sebanyak 3105 siswa polisi, tapi sebanyak 13 siswa polisi tidak lulus dikarenakan sikap dan perilaku diantara beberapa siswa yang dinilai tidak disiplin, misalnya ada siswa yang melakukan perjudian, perkelahian, kabur waktu pendidikan. Tahun 1998 sebanyak 3 siswa dipecat karena melakukan pelanggaran selama pendidikan, tahun 1999 sebanyak 2 orang siswa bernama Ilham dipecat karena berjudi waktu pendidikan dan Irwan dipulangkan karena sakit, tahun 2000 sebanyak 5 siswa siswa diantaranya Agus, Ahmad, Roni, mereka kedapatan melakukan tindak yang tidak disiplin. Tahun 2000 dan pada tahun 2002 siswa polisi bernama Fahial meninggal dengan cara bunuh diri.⁴³ Dari 3105 siswa yang diterima, hanya 3092 siswa yang lulus dan dilantik serta ditugaskan diberbagai wilayah Sumatera Barat. Diharapkan lulusan SPN Padang Besi dapat menjalankan tugasnya dalam memelihara, menjaga dan melindungi masyarakat sesuai dengan tugas umum kepolisian. Adapun beberapa alumni SPN Padang Besi yang masih bertugas

⁴³ Wawancara dengan Husni Mubarak, di Padang tanggal 12 April.

antara lain : Bripka Joniter Darma, Bripka Yusrizal, Brippol Asep Sudrajat, Brippol Hendra Wijaya, Brippol Husni Mubarak.

4. Kurikulum

Pada masa reformasi SPN Padang Besi memakai kurikulum baru, karena Polri sudah lepas dari ABRI maka pendidikannya lebih difokuskan sebagai pelayan masyarakat serta melindungi, mengayomi masyarakat. Adapun tujuan pendidikan ialah:

Membentuk dan mengembangkan personel terpilih untuk menjadi Bintara Polri yang memiliki sikap mental, perilaku dan kesamaptaan jasmani serta menguasai ketrampilan teknis dan taktis professional kepolisian agar mampu melaksanakan tugas umum kepolisian yang dijiwai oleh Tri Brata, Catur Prasetya dan Kode Etik Polri.

Materi Ajaran

A. Pentahapan

1. Tahap I (Pengantar dan Pendidikan Dasar Bhayangkara

Adalah tahap pembentukan fisik dan mental serta pembekalan kepada peserta didik agar memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar kebhayangkaraan dan/atau kepolisian, sikap mental, etika dan kejuangan sebagai perwujudan pengamalan Tri Brata dan Catur Prasetya melalui pendekatan pembinaan jasmani serta bimbingan dan pengasuhan sehingga memperoleh pemahaman dan penghayatan tentang jati diri serta tugas sebagai anggota Polri.

2. Tahap II (Kemampuan Preventif)

Adalah tahap pembekalan ketrampilan tekhnis dan taktis tugas-tugas preventif kepolisian sebagai bintanga tugas umum unit Sabhara. pada tahapan ini juga dibekali pengetahuan Fungsi Teknis Operasional (F.T Operasional) sebagai pendukung tugas-tugas preventif kepolisian.

3. Tahap III (Kemampuan Represif/pelengkap) dan Pembulatan Pendidikan

Adalah tahap pembekalan pengetahuan hukum serta ketrampilan tekhnis dan taktis tugas-tugas represif kepolisian sebagai Bintanga tugas umum kepolisian serta pemantapan pengetahuan dasar kepolisian serta ketrampilan tekhnis maupun taktis melalui kegiatan simulasi, latihan tekhnis dan latihan kerja di Satuan Kewilayahan.⁴⁴

Semua kegiatan siswa juga hampir sama dengan dengan sebelumnya. Semua pelajaran yang diikuti akan diberi nilai, yang nantinya nilai ini yang akan menentukan prestasi siswa. Selama 6 bulan pendidikan siswa harus memenuhi 1200 jampel, untuk mencapai kemampuan ketrampilan dan kualitas yang diharapkan, maka diadakan pembagian metode pembelajaran berdasarkan persentase teori dan praktek.⁴⁵

1. Untuk mata pelajaran teori, metode pembelajarannya:
 - a. Teori : maksimal 60%
 - b. Praktek/diskusi : minimal 40%
2. Untuk mata pelajaran praktek, metode pembelajarannya:
 - a. Teori : maksimal 30%
 - b. Praktek : minimal 70%.

⁴⁴ Sumber dari *Kurikulum* tahun 2002. Untuk lebih jelasnya lihat pada lampiran Surat Keputusan SKEP Dediklat Kapolri No. Pol. : SKEP/73/V/2002 tentang Perangkat Kendali Pendidikan Pertama Bintang Polri Tahun 2002, hal.2.

⁴⁵ *Wawancara* dengan Adolof Ikhwan, di Padang tanggal 10 Februari 2012.

Perbedaan kurikulum masa reformasi dengan Orde Baru yakni dari latihan dilapangan yang dikurangi, dan waktu belajar dikelas lebih diperbanyak. Pendidikan masa reformasi berlangsung selama 6 bulan, sedangkan Orde Baru pendidikan berlangsung selama 11 bulan. Latihan militer juga mulai dihapuskan.⁴⁶

Setelah lima (5) bulan mendapat pendidikan di SPN para siswa melaksanakan kegiatan magang . Program magang bagi siswa bintangara ini memang baru pertama kali dilaksanakan di jajaran Polri. Tujuan melaksanakan magang agar siswa bisa menerapkan teori di lapangan dan lebih mengenal tugas yang kelak akan dilaksanakan selaku aparat penegak hukum dan lebih mengenal daerah atau tempat saat menjalankan tugas.

5. Sarana, dan Prasarana di SPN

Pada Masa Reformasi 1998, SPN Padang Besi mulai menambah lagi fasilitas, sarana, dan prasarana di lingkungan SPN. Adapun penambahan fasilitas, sarana, dan prasarana untuk menunjang pendidikan yaitu:

a) Rumah Dinas

Adanya penambahan bangunan rumah dinas yang ditempati oleh para instruktur dan staf di SPN Padang Besi, seperti : Rumah dinas type 54 berjumlah 15 pintu, type 45 berjumlah 6 pintu , type 38 berjumlah 8 pintu , dan type 27 berjumlah 10. Rumah ini ditempati sesuai dengan pangkat tertinggi hingga terendah.

b) Mimbar upacara

Mimbar upacara sebanyak 3 unit.

c) Kantin siswa

⁴⁶ Wawancara dengan Novisa Putra, di Padang tanggal 10 Maret 2012.

Sebelumnya kantin siswa hanya berjumlah 1 unit, dan dibangun lagi karena satu kantin tidak cukup untuk menampung siswa SPN.

d) Lapangan volly, basket dan tennis

Lapangan ini digunakan siswa maupun staf SPN untuk berolahraga. Luas lapangan adalah 3000M². Selebihnya fasilitas yang lain sama dengan periode sebelumnya.⁴⁷

D. Profil

1. Profil Ka. SPN Padang Besi

a) AKBP Pol Drs Sugeng Heryanto, MBA

AKBP Drs. Sugeng Heryanto, MBA merupakan Ka SPN yang mulai menjabat pada tahun 2001-2004, sebelum menjabat Ka SPN beliau bertugas sebagai Kapolres di Kalimantan Barat. beliau menamatkan pendidikannya di AKPOL pada tahun 1978 dan mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dan Sespimpol dan keahlian beliau di bidang PA Lantas. Beliau merupakan polisi yang sudah malang melintang diberbagai instansi kepolisian. Tugas beliau selama di SPN Padang Besi cukup berat, dengan pisahnya polri dari TNI maka beliau bersama-sama dengan para staf lainnya berusaha untuk mengubah semua sistem pendidikan dengan sebelumnya. Setelah beliau menyelesaikan tugasnya sebagai Ka SPN Padang Besi, beliau melanjutkan kariernya sebagai pengajar di lembaga pendidikan Sespim Polri, beliau juga pernah diangkat menjadi Dir Binamar Polda Kalimantan Barat, sekarang beliau

⁴⁷ *Wawancara* dengan Adolof Ikhwan, di Padang tanggal 10 Februari 2012.

bertugas sebagai Staf Ahli BNN Pemberdayaan Masyarakat di Polda Kalimantan Barat.⁴⁸

2. Profil Instruktur SPN Padang Besi

a) Mayor Polisi H.M. Maat Achin RB

Maat Achin beliau seorang instruktur yang mengajar di SPN Padang Besi, beliau juga merupakan alumni SPN Padang Besi tahun 1966. Setelah menyelesaikan pendidikan Agen Polisi beliau ditugaskan untuk mengabdikan di SPN Padang Besi dengan jabatan sebagai Pembantu Instruktur Deplat tahun 1966-1975, beliau melanjutkan Sekolah Bintara Polri pada tahun 1975, setelah menyelesaikan sekolahnya beliau diangkat menjadi instruktur Dodiklat pada tahun 1976-1986, dan beliau melanjutkan Sekolah Polisi Calon Perwira tahun 1985. Setelah lulus beliau dipindahtugaskan di bagian Keuangan Polda Sumbar 1987, Primkopol Polda Sumbar 1990-1991, Ses Dispen Polda Sumbar 1993-1996 dan menjabat sebagai Kadispen Polda Sumbar pada tahun 1996-1999.

Selain aktif sebagai anggota Polri, beliau juga aktif dalam kegiatan jurnalistik dan Ormas. Banyaknya karya tulis yang beliau hasilkan di antara lain Dodiklat dalam usia 24 tahun, Gema dan Rangkiang, Buku tahun emas Polda Sumbar, pimpinan majalah Rangkiang Polda Sumbar, strategi menggiring misionaris ke penjara. Dalam bidang ormas beliau pernah menjadi pelatih bola voli di Padang, pelatih dan sekretaris I PBVSI Sumbar, pembina bola voli Sumbar, ketua umum GMM Sumbar, ketua umum FAKTA Sumbar. Anggota Polri yang

⁴⁸ Wawancara dengan Himsar Siregar, di Padang tanggal 10 Mei 2012

mendapat penghargaan Narariya Bayangkara 1996 dari Presiden Soeharto ini pensiun pada tahun 1999 dengan pangkat Mayor Polisi.⁴⁹

b) AKP Himsar Siregar

Himsar Siregar instruktur yang mengabdikan pada SPN Padang Besi, beliau juga merupakan alumni siswa polisi angkatan 1988, setelah lulus langsung ditempatkan di SPN Padang Besi sebagai staf Jarlat dan merangkap sekretaris Brimkop, pada tahun 1992 beliau dipindahkan di bagian Korsis SPN Padang Besi. pada tahun 1995-1998 beliau kembali di bagian Jarlat, beliau sempat menjadi instruktur pada tahun 1996, pada bulan Agustus beliau melanjutkan pendidikannya di Sekolah Perwira. Selesai pendidikan tahun 2001 beliau bertugas sebagai Wakapolsek Padang Barat, dan pindah ke Polresta Padang tahun 2005 sebagai Kanit II Intelkom, tidak lama setelah menjabat sebagai Kanit II Intelkom beliau pindah tugas ke Pasaman sebagai Kapolsek Lembah Melintang. Tahun 2008 beliau kembali ke SPN Padang Besi sebagai Kaur Rendiklat Jarlat, polisi yang telah mendapat penghargaan bintang nararia ini hingga sekarang masih aktif sebagai Ka korsis SPN Padang Besi.⁵⁰

3. Profil Alumni SPN Padang Besi

a) Serma Slamet B.S

Slamet B.S alumni pertama agen polisi SPN Padang Besi, dari awal kariernya hingga pensiun, beliau masih berada di lingkungan SPN Padang Besi. Tahun 1961 beliau ikut mendaftar sebagai calon siswa SPN Padang Besi, setelah lulus pada tahun 1963 beliau langsung ditempatkan di SPN Padang Besi sebagai pembantu instruktur, tahun 1970 beliau melanjutkan Sekolah Bintara Polisi dan

⁴⁹ Wawancara dengan Maat Achin, di Padang tanggal 15 Mei 2012.

⁵⁰ Wawancara dengan Himsar Siregar, di Padang tanggal 16 Mei 2012.

setelah lulus beliau menjadi instruktur bintara pada tahun 1975-1976, tahun 1977 beliau ditugaskan di bagian keuangan SPN. Tahun 1980 beliau pindah dibagian logistik, hingga beliau pensiun tahun 1988 beliau juga masih aktif dalam membantu belanja dapur.⁵¹

b) Bripka Rahmat Hakiki

Rahmat Hakiki mengikuti pendidikan di SPN Padang Besi tahun 1996-1997. Setelah lulus beliau ditunjuk untuk mengikuti pendidikan Dikjur Dasba Brimob di Sukabumi tahun 1997, setelah lulus menjadi anggota Brimob dan langsung ditugaskan di Brimob Polda Sumbar. Sekarang beliau merupakan staf pasukan Brimob. Selama bertugas beliau telah dua kali mendapat penghargaan dari Presiden atas jasanya dalam operasi Aceh 2004 dan penghargaan Satya Lencana.⁵²

c) Bripka Sonny Alexander Simatupang

Sonny Alexander Simatupang merupakan siswa SPN Padang Besi tahun 1996-1997, setelah menyelesaikan pendidikan di SPN beliau mengikuti pendidikan bintara Brimob di Sukabumi, beliau langsung ditugaskan di Brimob Polda Sumbar. Sekarang beliau menjabat sebagai Kasubsi Komsat Seksi Tekkom di Sat Brimob Polda Sumbar. Selama menjadi anggota Polri beliau sangat aktif ikut serta dalam pengamanan di daerah konflik di Aceh, beliau juga ikut pelatihan pemetaan digital GIS berbasis Web sejajaran Korp Brimob Polri, beliau juga pernah menjabat sebagai Bintara Instruktur Sat Brimob Polda Sumbar. Selama

⁵¹ Wawancara dengan Slamet B.S, di Padang tanggal 14 Maret 2012.

⁵² Wawancara dengan Rahmat Hakiki, di Padang tanggal 15 Mei 2012.

bertugas beliau telah mendapat penghargaan Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun dan Satya Lencana Darma Nusa.⁵³

d) Bripka Jonniter Darma

Jonniter Darma ialah alumni siswa SPN tahun 1998-1999, setelah lulus pendidikan, beliau ditugaskan sebagai anggota SIE Propam. Selama mengabdikan sebagai anggota polisi, beliau telah sering menangkap para pelaku curanmor, dan pengungkapan kasus kriminal lainnya. Beliau juga mendapat penghargaan sebanyak dua kali atas dedikasinya dalam kasus yang terjadi di Sijunjung.⁵⁴

e) Brigadir Polisi Husni Mubarak

Husni Mubarak ialah siswa SPN angkatan 2002, selesai pendidikan di SPN Padang Besi beliau ikut pendidikan Sat Brimob Polda Sumbar di Sukabumi. Selesai pendidikan brimob, beliau langsung ditugaskan di Brimob Polda Sumbar. Beliau juga aktif ikut membantu dalam operasi pengamanan di daerah konflik. Sekarang beliau berada di Detasemen Gegana di unit penjinak bom.⁵⁵

⁵³ *Wawancara* dengan Sonny Alexander Simatupang, di Padang tanggal 20 Mei 2012

⁵⁴ *Wawancara* dengan Jonniter Darma, di Padang tanggal 22 Mei 2012.

⁵⁵ *Wawancara* dengan Husni Mubarak, di Padang tanggal 20 Mei 2012.



BAB IV

KESIMPULAN

Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi merupakan sekolah yang didirikan untuk mendidik dan melatih para calon anggota polri agar bisa menjadi pelindung masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta dapat menegakan hukum. Pada awal pendirian Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi pada tahun 1961 dimaksudkan untuk mengisi kekosongan agen polisi (tamtama) di Sumatera Barat. Selain untuk mengisi kekosongan personilnya, pendirian SPN Padang Besi ini tidak terlepas dari peristiwa pergolakan yang terjadi di Sumatera Barat.

Peristiwa pemberontakan PRRI yang terjadi pada tahun 1958 telah mengakibatkan rakyat Sumatera Barat menderita baik secara moral dan materil. Laupun pemberontakan PRRI telah dapat dihentikan, tapi penderitaan masih dirasakan oleh rakyat. Hal ini dikarenakan masuknya unsur PKI kedalam tubuh APRI, dimana tentara pusat melakukan tindakan yang semena-mena terhadap rakyat seperti melakukan perampokan, pencurian, bahkan memaksa rakyat untuk menjadi anggota PKI.

Pendirian Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kepala Kepolisian Negara No. Pol:62/SK/MK/1961 diharapkan dapat menghasilkan insan polri yang dapat memberikan keamanan dan perlindungan kepada masyarakat. Penerimaan siswa angkatan pertama SPN Padang Besi ini diutamakan putra daerah yang masih muda dan kuat. Masyarakat menyambut baik dengan pendirian SPN Padang Besi, ini terlihat dengan diizinkan pihak SPN Padang Besi untuk menggunakan lahan masyarakat

Padang Besi untuk mendirikan bangunan serta fasilitas-fasilitas untuk menunjang lancarnya pendidikan.

Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi diresmikan pada tanggal 30 Desember 1961 yang ditandai dengan penerimaan siswa baru yang sebelumnya telah mengikuti tes penerimaan siswa. Walaupun SPN Padang Besi ini berdiri ditengah-tengah terjadinya pergolakan, tapi tidak menyurutkan semangat pemuda Sumatera Barat untuk menjadi siswa agen polisi. pendirian bangunan SPN pada masa ini juga belum sempurna, tapi itu tidak menjadi hambatan bagi siswa agen polisi untuk belajar. Walaupun hanya mempunyai alat-alat dan ruang belajar yang belum lengkap, siswa agen polisi menggunakan rumah sakit dan garase mobil untuk belajar. Bahkan tidak jarang siswa juga ikut aktif dalam membangun fasilitas-fasilitas SPN Padang Besi.

Setelah melaksanakan pendidikan selama 6 bulan, maka pada tanggal 15 Januari 1963 siswa agen polisi angkatan I dilantik sebanyak 239 siswa, dan lulusan ini ditugaskan ke berbagai wilayah di Sumatera Barat dan diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dalam menegakkan hukum serta melindungi masyarakat yang masih berada dalam suasana pergolakan. Sejak berdirinya SPN Padang Besi banyak pemuda yang berminat untuk mengikuti pendidikan polisi ini, hampir tiap tahun diadakan penerimaan siswa polisi. tapi pada tahun 1966-1969 terdapat kekosongan kegiatan di SPN ini hak ini dikarenakan masa peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru.

Sejak berdirinya SPN Padang Besi 1961-2002, SPN Padang Besi telah melalui tiga periode Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi. Selama itu juga SPN Padang Besi mengalami perubahan dari segi pendidikan dan latihan. Pada

masa Orde Lama (1961-1966) pendidikan yang didapat tidak sepenuhnya bersifat militer, hal ini dikarenakan fungsi agen polisi sendiri adalah menjaga dan melindungi masyarakat terutama pada masa pergolakan.

Pada masa Orde Baru (1966-1998) pendidikan yang didapat siswa lebih bersifat militer, dimana pendidikan angkatan darat sebagai acuannya. Selama masa pendidikan ini siswa polisi selain bertugas melindungi masyarakat juga dipersiapkan untuk berperang. Pada masa ini pendidikan fisik lebih ditingkatkan lagi, ini menjadikan lulusan siswa polisi ini berbeda dengan pendidikan msaa sebelumnya. Pendidikan yang bersifat militer ini juga berpengaruh terhadap mental dan karakter anggota polisi, dimana dalam penanganan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dilakukan dengan sikap militer.

Pada reformasi juga ditandai dengan lepasnya Polri dari tubuh ABRI juga berdampak terhadap pendidikan polisi. Pada tahun 2002 terjadi perubahan sistem pendidikan siswa polisi, dimana sistem pendidikan yang sebelumnya bersifat militer sudah dihapuskan. Lulusan polisi diharapkan mampu memperbaiki citra polisi yang sebelumnya banyak ditakuti masyarakat karena sikap arogannya.

Dari tahun 1961-2002 Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi terus berkembang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Perkembangan SPN Padang Besi juga dibuktikan dengan lengkapnya fasilitas, sarana dan prasarana dalam menunjang pendidikan polisi. diharapkan lulusan SPN Padang Besi ini dapat menjadi insan polri yang terdidik agar dalam penanganan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat lebih bersifat persuasi dengan mengedepankan pendekatan personal yang lebih manusiawi, membuat Polri perlahan tapi pasti menjadi bagian dari masyarakat sipil.

Daftar Pustaka

A. Arsip

- Data Kurikulum Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi 2002
- Data Siswa Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi 1961-2002
- Data Materil Logistik SPN Padang Besi
- Daftar Tanah Milik SPN Padang Besi
- Surat Keputusan KAN Lubuk.Kilangan nomor 31/KAN/LK/IV-1989.
- Perangkat Kendali Pendidikan Sekolah Bintara Prajurit Karier Polri 1994
- Perangkat Kendali Pendidikan Pertama Polri Tahun 2002
- Penjabaran Pola Pengasuhan Peserta Didik Diktuk Brigadir Polri Pada SPN Padang Besi .

B. Buku-Buku

- Abrar Yusra. *Tokoh yang Berhati Rakyat : Biografi Harun Zain*, Jakarta: Yayasan Gebu Minang, 1997.
- A.Budiarto. *Pimpinan dan Kepimpinan*, Jakarta:LP3ES, 1987.
- Alumni Sekolah Polisi Bagian Tinggi Sukabumi, *Sejarah Pendidikan Dan Patriotisme Kepolisian*. Jakarta: Alumni Sekolah Polisi Bagian Tinggi Sukabumi,1993.
- Ani Purwanti, *Profil Sekolah Polisi Negara (SPN) di Jawa Tengah*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2003.
- Gusti Asnan. *Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat Tahun 1950-an*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Harsja W. Bachtiar Ilmu kepolisian, *Ilmu Kepolisian Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan yang Baru*, Jakarta:Gramedia,1995.
- Hasril Chaniago, Khairul Jasmi, *Brigadir Jendral polisi Kaharoeddin Datuk Rang kayo Basa*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.
- I.Djumbuhur, *Sejarah Pendidikan*, Bandung:Bina Ilmu,1976.

- Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1994.
- Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, *Sejarah TNI jilid V(1984-2000)*, Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000.
- Markus Gunawan, *Buku Pintar Calon Anggota&Anggota Polri*, Jakarta:Transmedia Pustaka, 2009.
- Mestika Zed, *Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1995*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.
- M.Oudang. *Perkembangan Kepolisian di Indonesia*, Jakarta:Mahabrata,1952.
- Nasution. S, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, Bandung: Jemmars, 1983.
- Nugroho Notosusanto. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*, Jakarta :Inti indayu Press,1984.
- Redja Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan : Sebuah Studi di Awal Tentang Dasar-dasar Pendidikan pada umumnya dan Pendidikan di Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta:Gramedia,1993.
- Satjipto Rahardjo,*Membangun Polisi Sipil*, Jakarta:PT Kompas Media Nusantara,2007.
- Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi, *24 Tahun Pengabdian Dodiklat Padang Besi*, Padang : Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi, 1985.
- Slmaet Imam Santoso, *Pendidikan di Indonesia dari Masa Ke Masa*, Jakarta: Haji Masagung,1987.
- Taufik Abdullah. *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta :Gajah Mada University Press,1985

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Bartius
Umur : 76 tahun
Pekerjaan : Mantan Ketua KAN
Alamat : Padang

2. Nama : Slamet B.S
Umur : 73 tahun
Pekerjaan : Alumni SPN angkatan I
Alamat : Padang

3. Nama : Syarbaini
Umur : 70 tahun
Pekerjaan : Alumni SPN angkatan III
Alamat : Padang

4. Nama : Zulkarnaini
Umur : 50 tahun
Pekerjaan : Mantan pejabat SPN Padang Besi
Alamat : Padang

5. Nama : Ragat Sirait
Umur : 51 tahun
Pekerjaan : Mantan pejabat SPN Padang Besi
Alamat : Padang

6.Nama : Maat Achin
Umur : 70 tahun
Pekerjaan : Mantan Instruktur SPN Padang Besi
Alamat : Padang

7.Nama : Syamsul Bahri
Umur : 53 tahun
Pekerjaan : Mantan Waka SPN Padang Besi
Alamat : Padang

8.Nama : Sadrinal
Umur : 55 tahun
Pekerjaan : Mantan pejabat SPN Padang Besi
Alamat : Padang

9.Nama : Adolof Ikhwan
Umur : 52 tahun
Pekerjaan : Instruktur SPN Padang Besi
Alamat : Padang

10. Nama : Himsar Siregar
Umur : 53 tahun
Pekerjaan : Ka Korsis SPN Padang Besi
Alamat : Padang



11. Nama : Rahmat Hakiki
Umur : 38 tahun
Pekerjaan : Personil Brimob Polda Sumbar
Alamat : Padang

12. Nama : Ernanda Putra
Umur : 40 tahun
Pekerjaan : Kanit Lantas Polres Padang Panjang
Alamat : Padang Panjang

13. Nama : Jonisman
Umur : 55 tahun
Pekerjaan : Kabag Jarlat SPN Padang Besi
Alamat : Padang

14. Nama : Jonniter Darma
Umur : 34 tahun
Pekerjaan : Reserse
Alamat : Sijunjung

15. Nama : Husni Mubarak
Umur : 32 tahun
Pekerjaan : anggota Sat Brimob Polda Sumbar
Alamat : Padang



16. Nama : Sonny Alexander Simatupang
Umur : 38 tahun
Pekerjaan : anggota Sat Brimob Polda Sumbar
Alamat : Padang

17. Nama : Novissa Putra
Umur : 30 tahun
Pekerjaan : anggota polri
Alamat : Padang



LAMPIRAN 1



Gerbang SPN Padang Besi

Sumber : Dokumentasi Vitry, pada tanggal 10 Maret 2012



**Siswa Agen Polisi ikut berpartisipasi dalam
Proses pembangunan gedung SPN tahun 1962**

Sumber : 24 Tahun Pengabdian Dodiklat Padang Besi

LAMPIRAN 2



Gedung Pendidikan SPN Padang Besi

Sumber : Dokumentasi Vitry, pada tanggal 10 Maret 2012



Barak Gunung Tandikek

Sumber : Dokumentasi Vitry, pada tanggal 10 Maret 2012

LAMPIRAN 3



Proses Perekutan Siswa SPN Padang Besi tahun 1970

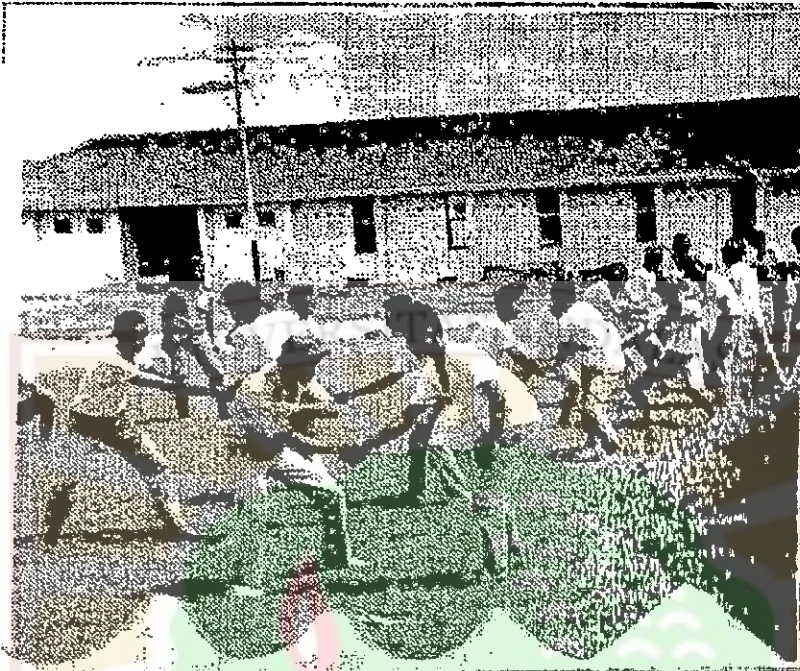
Sumber : 24 Tahun Pengabdian Dodiklat Padang Besi



Proses Perekutan Siswa SPN Padang Besi tahun 1980

Sumber : 24 Tahun Pengabdian Dodiklat Padang Besi

LAMPIRAN 4



Peragaan Bela Diri oleh Siswa Agen Polisi Tahun 1962

Sumber : 24 Tahun Pengabdian Dodiklat Padang Besi



Latihan Baris-berbaris Siswa SPN Padang Besi tahun 1980

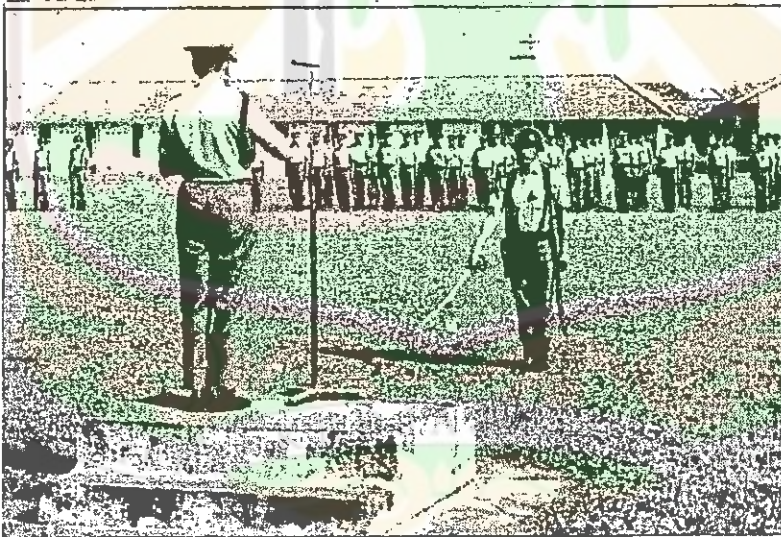
Sumber : 24 Tahun Pengabdian Dodiklat Padang Besi

LAMPIRAN 5



Siswa SPN jalan pagi mengelilingi kompleks Padang Besi

Sumber : 24 Tahun Pengabdian Dodiklat Padang Besi



Upacara Pelantikan Siswa SPN Padang Besi tahun 1962

Sumber : 24 Tahun Pengabdian Dodiklat Padang Besi



LETKOL POL DRS. SOEWARDI S.A.

Kepala Dodiklat Padang Besi Tahun 1985

Sumber : 24 Tahun Pengabdian Dodiklat Padang Besi



**KA. S.P.N. PERTAMA
R. MOCH. MULYO
KOMISARIS POLISI TK. II**



**KA. S.P.N. KEDUA
R. HADI PANGESTOE
KOMISARIS POLISI TK. II**



**KA. S.P.N. KETIGA
AMINUDDIN JAKUB
KOMISARIS POLISI TK. I**



**KA. S.P.N. KEEMPAT
SOEPARNO EDHI
MAYOR POLISI**



**KA. S.P.N. KELIMA
DRS. ADNIN RIVAI
MAYOR POLISI**



**KA. S.P.N. KEENAM
AMIRUDDIN
LETNAN KOLONEL POLISI**



**KA. S.P.N. KETUJUH
DRS. NANA PERMANA
LETNAN KOLONEL POLISI**

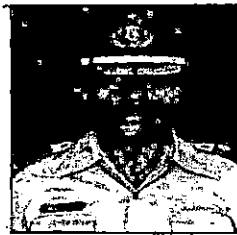


**KA. S.P.N. KEDELAPAN
DRS. DARWIN
LETNAN KOLONEL POLISI**

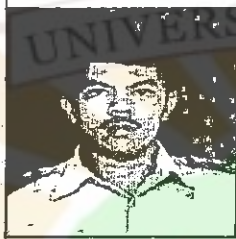
Ex. Pejabat Kepala Sekolah Polisi Negara Padang Besi

Sumber : 24 Tahun Pengabdian Dodiklat Padang Besi

PEJABAT PEJABAT DODIKLAT PADANG BESI



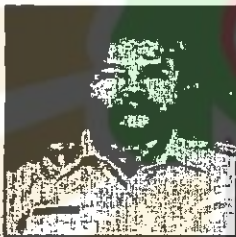
KABAG PEMBINAAN
MAYOR POL. W. LUNTUNGAN



KABAG LITBANG
MAYOR POL. Drs. A. MUCH. MUCHTAR



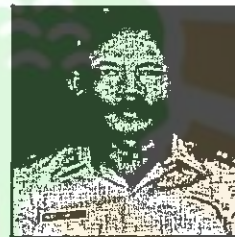
KABAG PENDIDIKAN DAN LATIHAN
MAYOR POL. Drs. A. WAHID



PATAUD KAPTEN



KA OP DEP



KA KORSIS

YAH



CAPA SALMAN



LETTUPOL SY. BAHRI



LETDAPOL DARWIN DJ.



LETDAPOL G. NGATIHO



LETDAPOL DJAMAAN DJ.



LETDAPOL MURTI



CAPA MAAD ACIN



CAPA ARMAN B.A.



CAPA SADRIINAL

Pejabat-Pejabat SPN Padang BESI Tahun 1985

Sumber : 24 Tahun Pengabdian Dodiklat Padang BESI

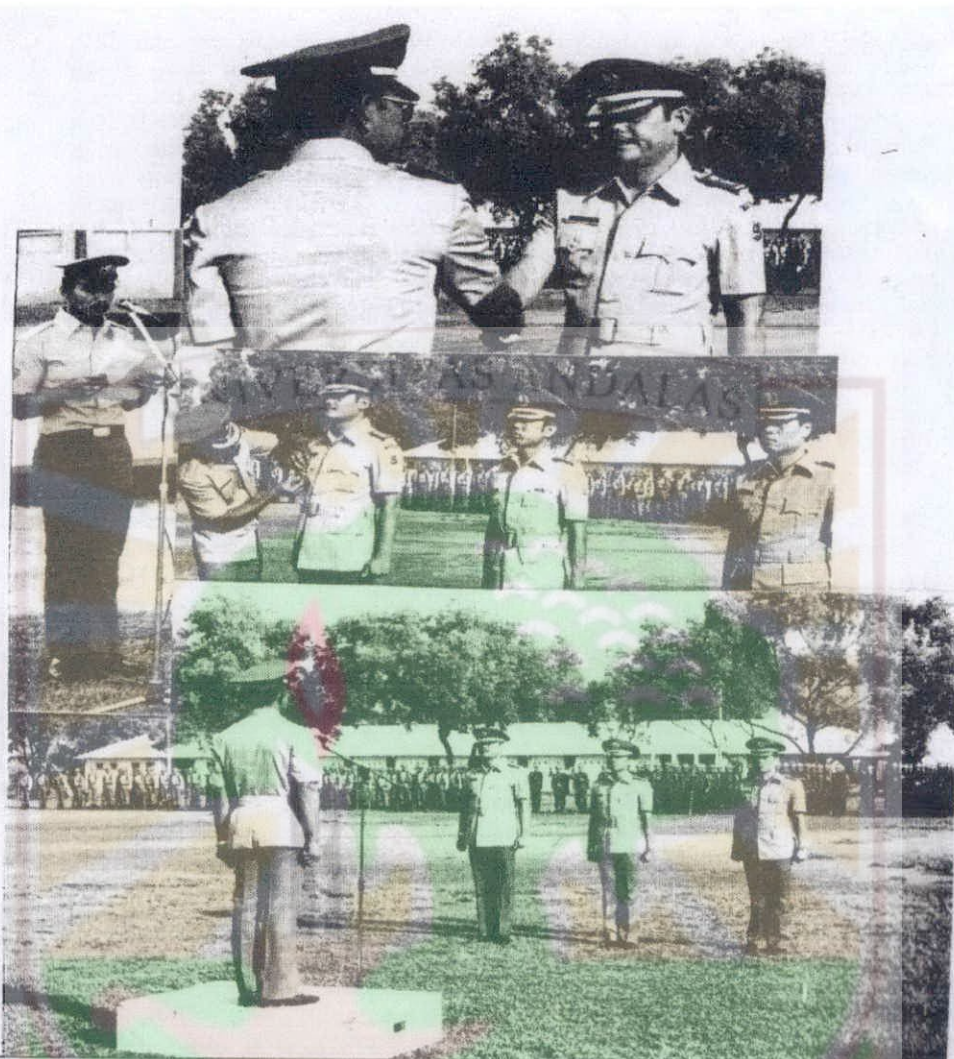
LAMPIRAN 8



Penyerahan Komando dan Pimpinan Dodiklat Padang Besi Letkol Pol Amiruddin kepada Mayor Pol Drs. Nana Permana Tahun 1981

Sumber : 24 Tahun Pengabdian Dodiklat Padang Besi

LAMPIRAN 9



Pelantikan Ka. SPN Letkolpol. Drs. Soewardi S.A. dan Ses Diklat Mayor Pol. Drs. Hadjar Purnawirman serta Kabag. Lat. Manyorpol Drs. Maman Rahman Kalil oleh Kadit Diklat Letkolpol Drs. Darwin di lapangan Dodiklat pada tanggal 23 Desember 1985 yang disaksikan oleh Personil dan Siswa.

Pelantikan Ka SPN Letkol Pol. Drs. Soewardi pada tanggal 23 Desember 1985

Sumber : 24 Tahun Pengabdian Dodiklat Padang Besi

NAMA-NAMA SISWA AGEN POLISI ANGKATAN I/1962

1. M. Nudarta	50. Aliumar Alim	99. Amiruddin. R	148. Melzwar
2. T a s m i r	51. Suhaimi	100. Zulkarnaini	149. I s m a i l
3. Slamet Wagino	52. Marwan	101. Adnan Nur	150. Syamsir
4. A z w a r	53. Saldi Ismail	102. Djabirin	151. B a k r i
5. D a r w i n	54. Bustam. A	103. Syamsur Mar	152. Djasman
6. Djarunin	55. Djazaruddin	104. Gustian Said	153. Ilyas. AN
7. Muslim TH	56. Baliinia. K	105. Djamilis	154. Syahrudin
8. Rahdairi	57. Riza Effendi	106. Azwir HM	155. Syamsuddin
9. Wirson	58. N a z i f	107. Zakir Boy	156. Rustari. R
10. R u s d i	59. Syofyan Rachmat	108. Wasil. D	157. Syukur. S
11. Zakaria	60. Amiruddin	109. Krismanurungga	158. Marah Samad
12. R u s t a m	61. Habisar. D	110. Idris Noeh	159. A. Arifin. M
13. Syahrul Hars	62. Rosli. M.	111. Chairuddin Muchtar	160. Machyar
14. Zuljafri Ahmad	63. Karno	112. Mawardi. A	161. Syahril
15. Syamsuar	64. Kamaruddin	113. Djafri. T	161. Syofyan
16. Harmaini	65. B a s i r	114. Rosman	162. Nursyafri. D
17. Aris Salim	66. Martini	115. Syamsuar. T	163. B a s r i
18. Wakijo	67. M. Yamin	116. Chaidir	164. Agustiar
19. Rudaini	68. M. Syafri. R	117. Baharuddin	165. Syahrul
20. Zainuddin	69. I s h a k	118. R u s w a n	166. Nasrul Leks.
21. Abunawas	70. B u j a n g	119. Rustam Syah	167. M. Said
22. Usman M. Noer	71. Bonar Silitonga	120. Marjulis. Dj.	168. Syamsuar
23. Mirdas	72. Sukarmi	121. Z a i n i	169. Awaluddin
24. Ahmad Junius	73. Djabir	122. Sukimin	170. Sudirman
25. Firdaus Abbas	74. Nurdin	123. E m e t	171. M a s r i i
26. Z a h a r	75. Bachtiar	124. Zainal Amri	172. Djuarateramuli
27. Ibnu Hajar	76. H a m b o	125. Mardjonis	173. Abdul Muis
28. Syafri. K	77. Hoesin	126. Amiruddin	174. Mudasaril MK.
29. Kutir. N	78. Abas. K. S.	127. I s m a i l	175. S y a h r u l
30. B u s y r a	79. I d r i s	128. Bachtiar. B	176. M u n a r
31. Alpen	80. Roslin	129.	177. Ridwan Syam
32. Syataruddin	81. Rosman. R	130. Bakri. T	178. Z u b i r
33. Syamsuar	82. Hasanuddin	131. Syahril	179. D a r z e n
34. Ridwan	83. Kasnidi	132. Syamsi	180. A. Wahab
35. Bakaruddin	84. Bachtiar, BA.	133. M. Yunus	181. Suardi. A
36. Julzar. R	85. Alimundr	134. Amiruddin N.	182. Abbas. M
37. S y a i b i	86. Syamsuddin	135. Harmaini	183. Zulkarnaini
38. Muchtar. R	87. Rustam	136. Zahari Syarif	184. A k a m a i
39. T u k i d i	88. Firdaus Effendi	137. Affuddin	185. Djamilis. N
40. A n w a r	89. R e s l i	138. Yantawir Djoni	186. Dahlan
41. Ropotan Siregar	90. Chaidir Malta	139. D a s r i	187. K a d i r
42. Zakir Ibrahim	91. Tupani Rianto	140. Asdiono	188. A r n i s
43. S y a f r i l	92. K a d a r	141. Djurri	189. Basrial
44. Rusdi Darwis	93. Sabiruddin	142. Azwar Yusuf	190. Amarullah
45. Mawardi	94. Syafrizal	143. Mardius	191. Buyung Ain
46. Kaslanus Pardede	95. Syamsuri	144. Ismet Syak	192. Syumardi Syam
47. Sutarso	96. Asyari Alwi	145. Ambizar	193. Supardi
48. M u z i r	97. Azhar. B	146. F. H. Sudjadjono	194. Santuel Simbolon
49. Mochi. Nursaan	98. Bukahar	147. Nurmis	195. Hasan Zaini
196. Ngaliman. AW.	207. Nasrul Syam.	218. A m r i	230. M u c h t i
197. Y u s w a r	208. Yuhelmi	219. Yunizar	231. Bakri Basir
198. D a s r i i	209. N a z a r	220. Luikman	232. Jasruan Tahar
199. N u r d i n	210. Duskartan	221. Afi Anwar. T	233. Slamet ES.
200. Aliakbar	211. Martis	222. M. Halim	234. D a m u i r
201. Syaukari	212. Mawardi. S	223. Y u s r i	235. Djailani
202. Darwis	213. Syahril	224. Y u l i u s	236. S y a f r i
203. Syafril Syaf	214. Anasri Djasbong	225. Amin Adab.	237. S y a f r i l
204. Anas. M	215. Zaharuddin	226. Martius Nur	238. Mawardi. S
205. Akzhan S.	216. A l i u s	227. Musmar	239. D a s r i i
206. Syahrudin	217. Suardi. B	228. Ibrahim. A	
		229. Lukman. R	

Nama-nama Siswa Agen Polisi Angkatan I

Sumber : 24 Tahun Pengabdian Dodiklat Padang Besi

**NAMA-NAMA AGEN POLISI TK. II ANGKATAN KE II
T.H. 1963 PADA SPN PADANG BESI**

1. Sa'idine Asni	48. Sultan Marajo	96. Syahrudin
2. Agus Kaharuddin	49. Yunus Dj.	97. Zaina bin Mohd. Zen
3. Kaharuddin	50. Antonius	98. Rusdi
4. Moentir	51. Abdul Aziz	99. Zulkarnaini
5. Mardas	52. Erman, R.A.	100. Rafli Rauf.
6. Amri	53. Abdul Kamil	101. Sariaji
7. Kondrat Simanjuntak	54. Isman	102. Bachtiar
8. I. G. Nyoman Pitja	55. M. Yusuf	103. Suardi, A
9. Hesar Hatabarat	56. Dardis Latif	104. Zaitud. K
10. Syamsu Bahar	57. Mohd. Nur	105. Ali Amran
11. Musni, T	58. Abdul Rahman	106. Kabaruddin
12. Abu Bakar	59. Syamsuar Yusuf	107. Taharuddin Akson
13. Nurulhik Syarif	60. Mardius, M	108. Usman Rahman
14. Syamsuddin	61. Alwi	109. Basri HS.
15. Sa'dijono	62. Rustam	110. Chaidir
16. Fauzil Kamal	63. Buyung Itam	111. Yunisar
17. Syarifuddin	64. Mohamad Usman	112. E. Kosasih
18. Rani, D.	65. Bakri	113. Darussalam
19. Zainal Achiar	66. Syamsu Anwar	114. Aizsahaman Simbolon
20. Syahrudin Djama'i	67. A. Rivali May	115. Chakruddin
21. Masril	68. Bestamar	116. Iskandar
22. Ali Munir	69. Syahrudin	117. Hasan Basri
23. Aswir	70. Yusri Kandung	118. Achiruddin
24. Moch. Nasir	71. Dabornus	119. Besaruddin
25. Rosman	72. Saikwan	120. Abdul Gafer
26. Parsi	73. Nurris Effendi	121. Zahrudin
27. A. Rizal Al Katub	74. Ismail, D	122. Marabanis
28. Yalyo	75. Yulius	123. Akmal Hamid
29. Syofyan Zainun	76. Nasrul	124. M. Kamul
30. Adwar	77. Taharuddin	125. Nasrul Noer
31. Matziruddin	78. Suardi	126. Ali Masri
32. M. Taher	79. Abdul Rivali	127. Ali Masri
33. Djamoris Malar	80. Mawardi	127. Zahrudin
34. Darwansyah	81. Endy Mahyu	128. Zahar
35. Rustam	82. Syamsuddin M.S.	129. Djahilir
36. Kasman	83. Achmad	130. Bakaruddin
37. Latanar	84. Syamsir Umar	131. Mochamad Zainun
38. Kasmar	85. Zulkifli Zabir	132. Syafri Mariani
39. Yusar Samah	86. Muhammad Usar	133. Robinson Djony
40. Syawaluddin	87. Zulkifli, R	134. Bakri, S
	88. Syafri K.	135. Anir
41. Ermann	89. Bustami Djasam	136. Alwin
42. R. Subahagio	90. M. Yumas	137. M. Nazar
43. Salman	91. Syofyan	138. Zazili
44. Martoyo	92. Bustami	139. Bustami, A
45. Sesmar, S	93. Marlis	140. Muchlis
46. Muslim	94. Nazaruddin	141. Darwis
47. Timotera	95. Saikani	142. Syamsul Bahri Yahya

Nama-nama Siswa Agen Polisi Angkatan II
Sumber : 24 Tahun Pengabdian Dodiklat Padang Besi



Secata Wamil Polri Gel. II Tahun 1979/1980

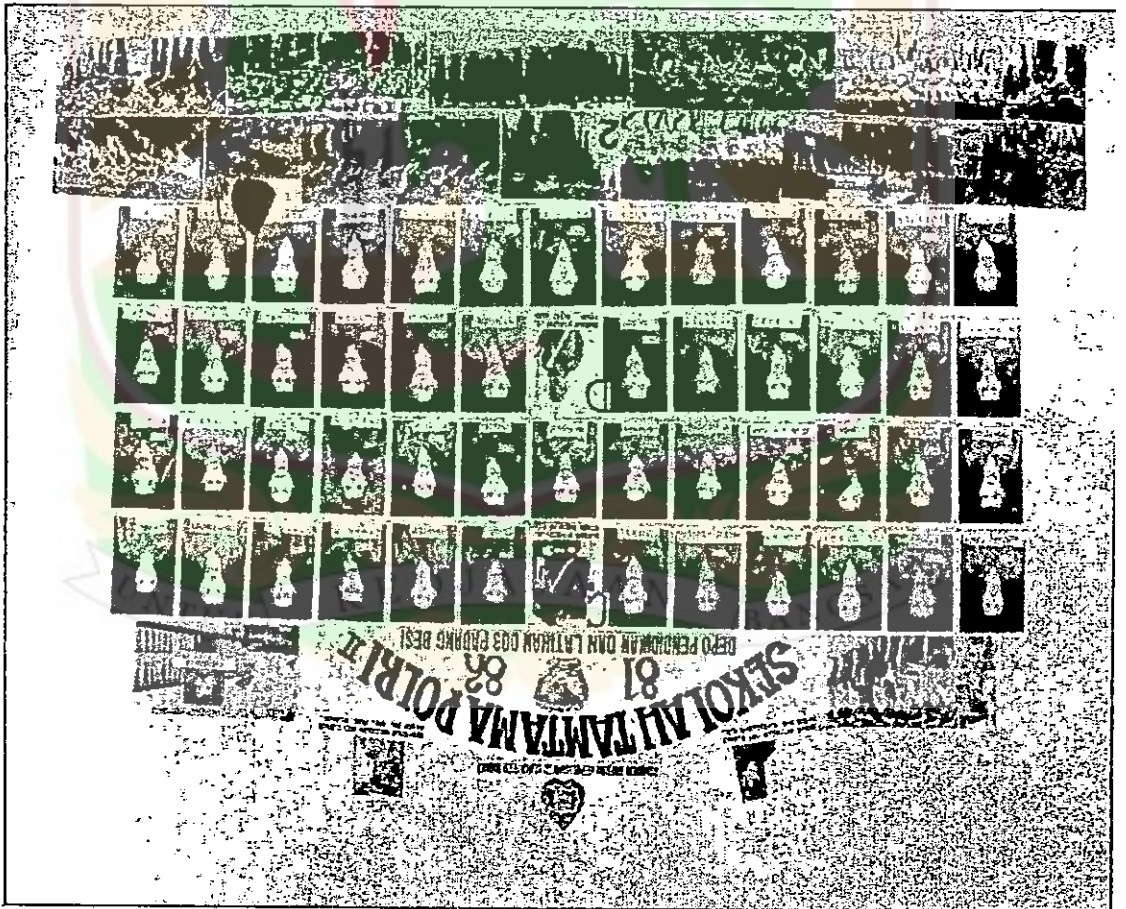
Sumber : 24 Tahun Pengabdian Dodiklat Padang Besi



UNIVERSITAS ANDALAS

Sumber : 24 Tahun Pengabdian Dodiklat Padang Besi

Sekolah Tamtama Polri 1981/1982





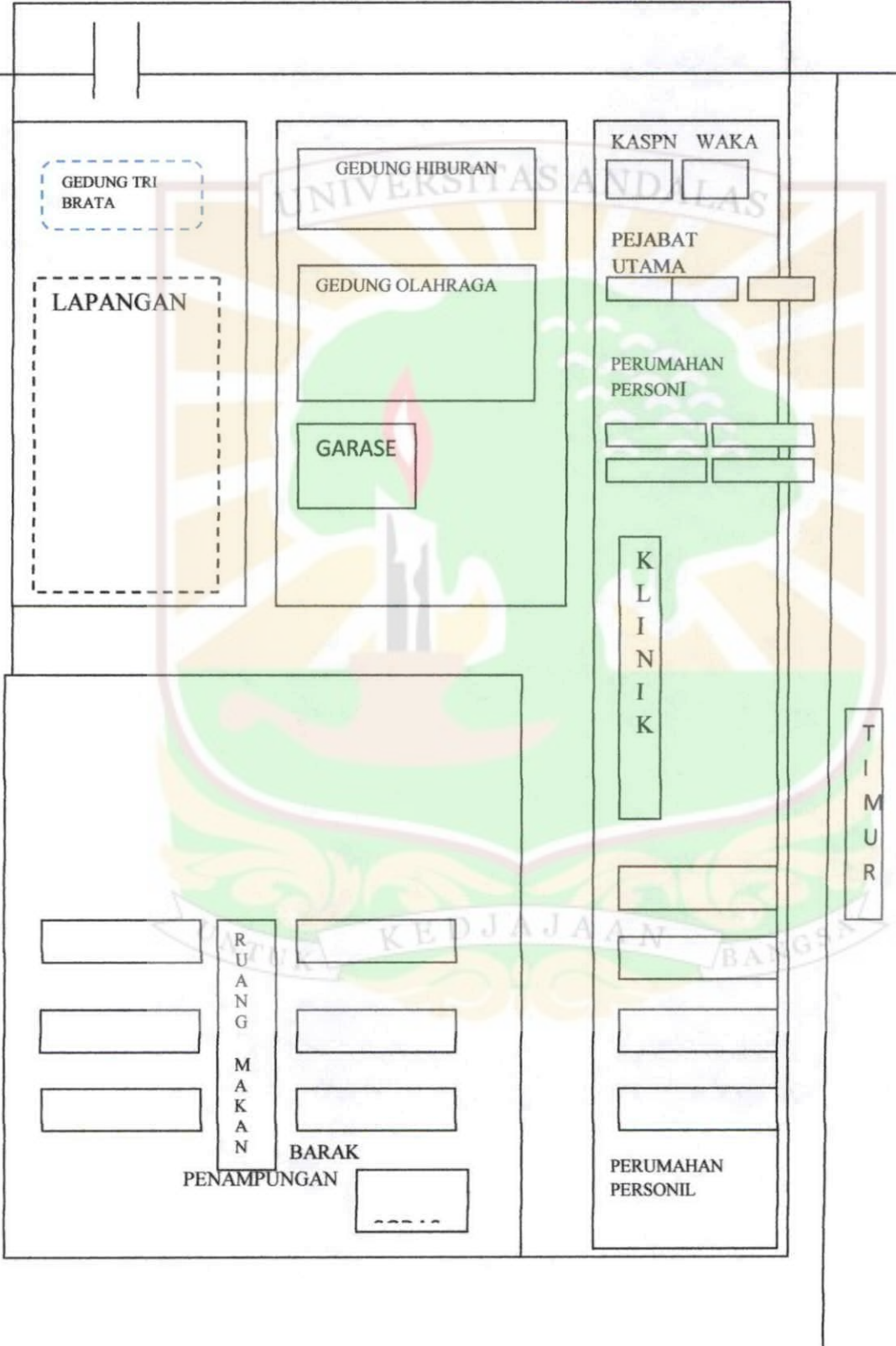
Siswa Latihan Menembak

Sumber : Dokumentasi Vitry, pada tanggal 10 Maret 2012

LAMPIRAN 14

DENAH SARANA DAN PRASARANA
SPN ORDE LAMA (1961 - 1966)

Utara



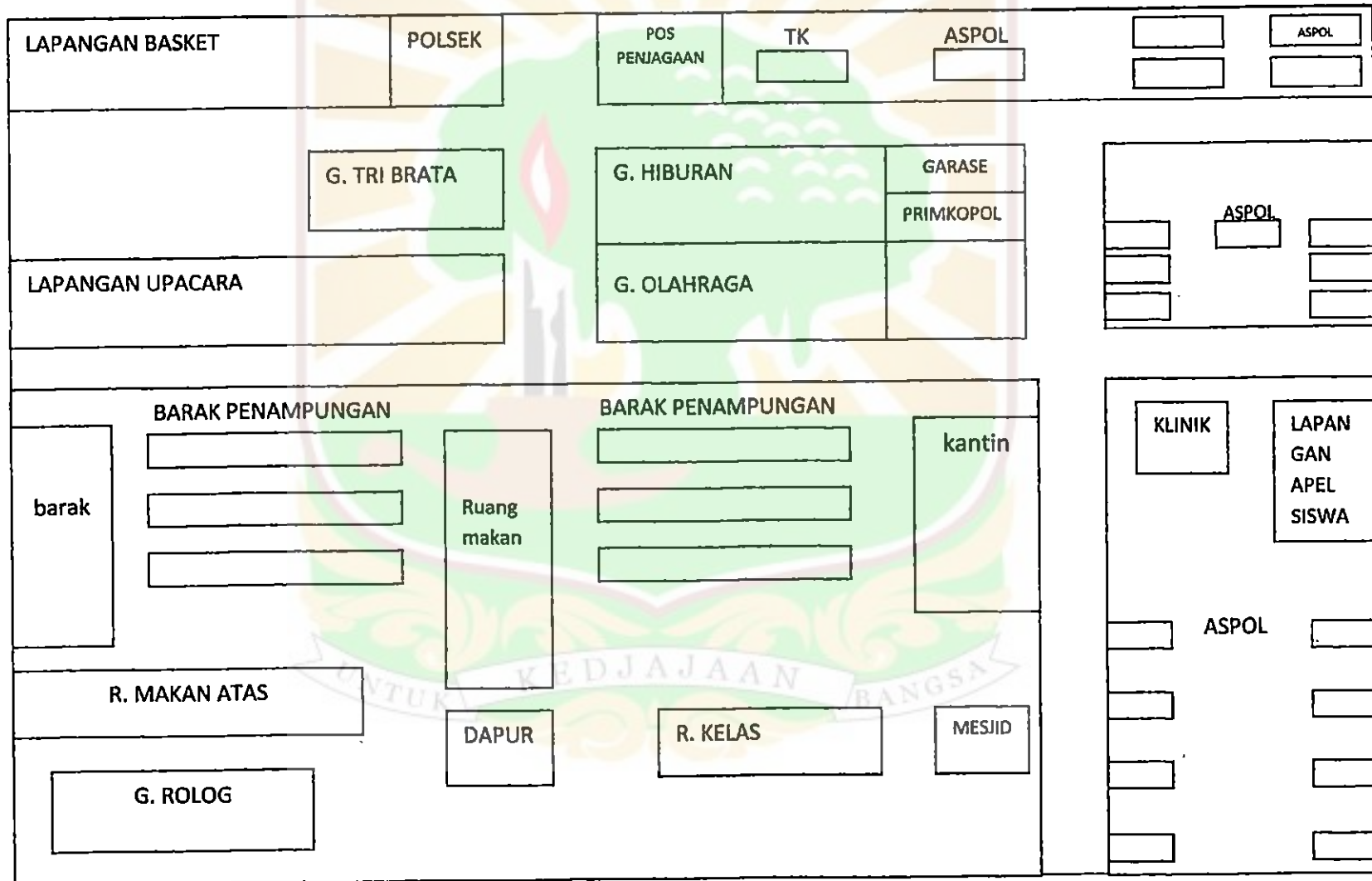
LAMPIRAN 15

DENAH SARANA DAN PRASARANA
SPN ORDE BARU (1966 - 1998)

UTARA

BARAT

TIMUR



LAMPIRAN 16

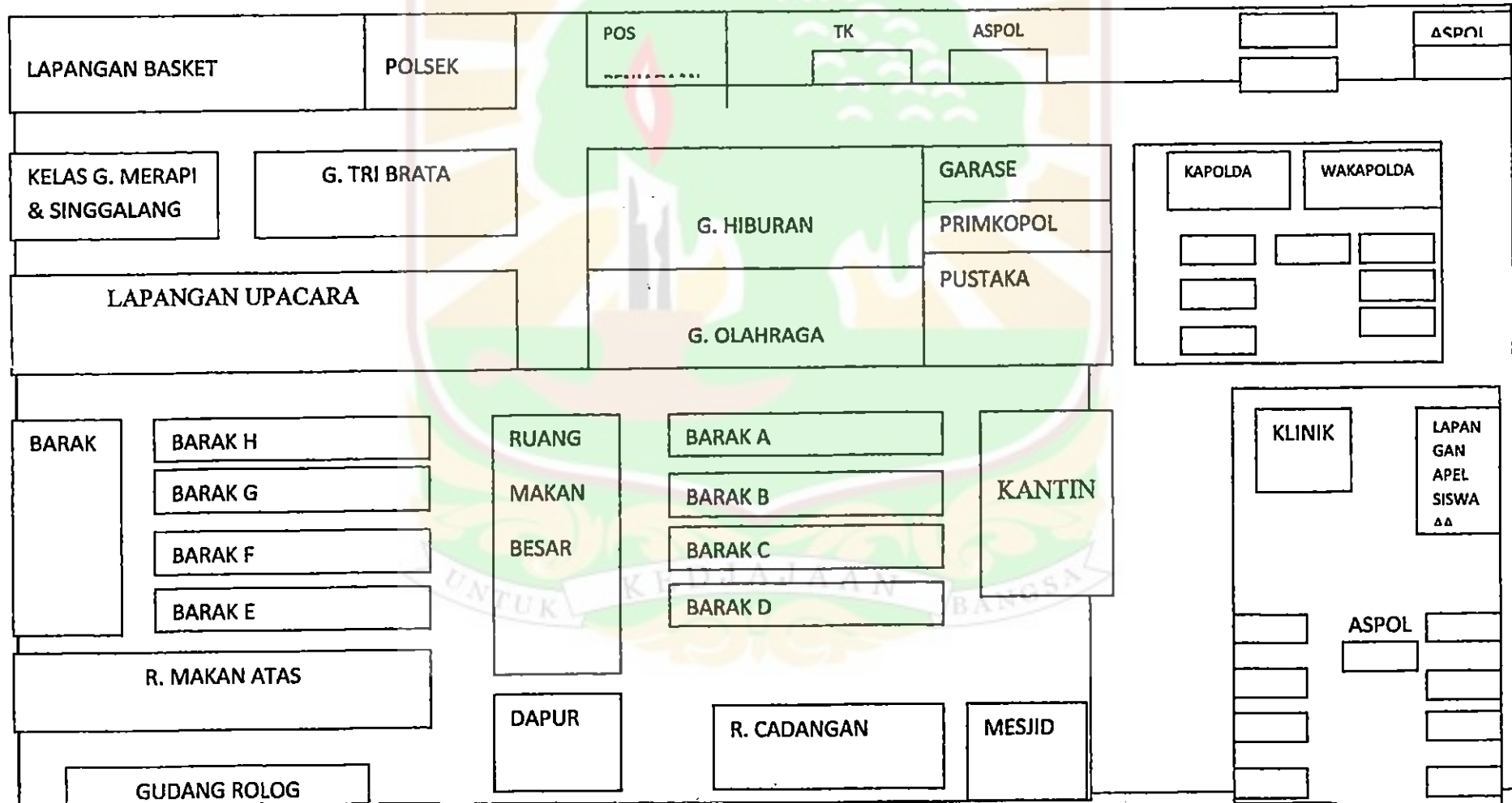
UNIVERSITAS ANDALAS
DENAH SARANA DAN PRASARANA

SPN REFORMASI (1998 – 2002)

UTARA

BARAT

TIMUR



REPERSENTASI DOKTER HUKUM
SARAJI
DOKTER HUKUM

Kantor: ...

PERUSAHAAN PENERBITAN
BUKTI PENGUNJUTAN DAN PASAL TERAK
PERUSAHAAN PENERBITAN BUKTI PENGUNJUTAN



... dan lain-lain ...

- 1. N a m a : ...
- 2. N a m a : ...
- 3. N a m a : ...
- 4. N a m a : ...
- 5. N a m a : ...

... dan lain-lain ...

... dan lain-lain ...

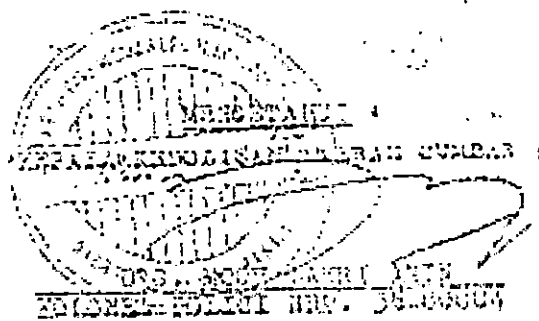
... dan lain-lain ...

... dan lain-lain ...

...

[Handwritten signature]
DRC. ...

[Handwritten signature]
DRC. ...



KESIMPULAN PENDAPAT
PENGHULU SURAT DAN MENDUDU ADAT WAGAH LAKU KILANGAN
I N T E R A K A N G
SURAT SDR. USMAN DT. SRIMARAJE SURUH LAMPANG

Pada hari ini Rabu tanggal 29 November tahun 1989 telah diadakan sidang di Kantor KAN Lt. Kilangan duduk beranggotakan dengan Penghulu adat Bagagus adat Wagah Lt. Kilangan bertempat di ruangan kantor KAN Lt. Kilangan menyuarakan tanggal 6 Oktober 1989 dan tanggal 13 Oktober 1989 untuk menanggapi surat Sdr. Usman Dt. Srimaraje surat Sipan - ng tertanggal 21 Agustus 1989 dan 17 September 1989 perihal tanah yang ditempati oleh sekolah Polisi (SPN) Padang Bani Melarakan Indragiri selatan Lt. Kilangan Padang.

Setelah dibahas dan dipertimbangkan menurut kerahangan adat dan hukum adat Sdr. Usman Dt. Srimaraje oleh Penghulu adat dan Bagagus adat Bagagus Lt. Kilangan, maka KAN merasa perlu mengeluarkan pendapat: dan pernyataan yang terdapat dalam surat kesimpulannya sebagai berikut :

1. Bahwa menyuarakan Penghulu adat dan Bagagus adat Bagagus Lt. Kilangan merasa biasa menerima dan mengakui sebahagian tanah yang ditempati oleh Sekolah Polisi Negeri (SPN) Padang Bani Melarakan ini adalah hak milik pribadi Sdr. Usman Dt. Srimaraje karena tidak ada tanda-tanda yang dapat dibuktikan oleh Sdr. Usman Dt. Srimaraje akan oleh hukum yang sekarang digunakan, baik pada waktu sekarang ini maupun selama ditetapkannya oleh SPN Padang Bani, sebab menurut adat tentang siapa saja yang berhak dalam Melarakan, harus memiliki, atau batali bukti hak milik berupa surat menyurat dan bukti dikandungnya hak-hak tersebut dan harus ada kesediaan untuk menyerahkan bukti-bukti tersebut kepada yang dianggap sebagai badan penguasa adat dan hukum yang sekarang digunakan, seperti berikut :

" Bering pipik tabung kasamuk, tibe alimarak mangadi mahan,
Bani hirik tarai Kamanak, tibe dimarak surun ke Kamanakan."

2. Bahwa karena kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun tanah yang dimaksud telah ditempati oleh SPN tidak pernah ada usaha dan upaya Sdr. Usman Dt. Srimaraje untuk mempertahankan hak-haknya menurut adat untuk memperoleh atau memperjuangkan tanah tersebut adalah bukti hak milik yang Sdr. Srimaraje baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Kepala Dusun melalui Sdr. Padang Bani, baik melalui menyuarakan maupun melalui hukum yang berlaku guna memberitahu dan mempertahankan tanah tersebut adalah hak milik pribadi Sdr. Usman Dt. Srimaraje.

3. Bahwa tujuan dikeluarkannya Surat Keputusan KAN Lt. Kilangan nomor 12/KAN/Lt./IV-1989 adalah untuk kepentingan bersama, kepentingan Masyarakat dan Negara Republik Indonesia.

Demikianlah kesimpulan pendapat ini kami sampaikan agar dapat dimaklumi adanya.

Dikeluarkan di : Lt. Kilangan
Pada tanggal : 29 November 1989
Ketepatan Adat Wagah (KAN)
Lt. Kilangan
Kecamatan Padang Kilangan
Ketua, Sekretaris,

- Dit. Usman Dt. Srimaraje
- Dt. R. Loble
- Dt. P. Marudun
- Dt. P. Marudun
- Dt. S. Marudun
- Dt. P. S. Marudun
- Dt. P. S. Marudun
- Dt. P. S. Marudun
- Dt. P. S. Marudun
- Dt. P. S. Marudun

Usman Dt. Srimaraje (Sdr. Usman Dt. Srimaraje)

1. APT SUPTISNO, BA
 2. KRISKANDAK
 3. ANP HELMIHON
 4. APT ARIZAL SYAH, SH. SS

1. TIM VERIFIKASI

UNIVERSITAS ANDALAS

ALUM KONSISTENSI POLISI NRP. 090100253

KUSIDITORS

KORPRI POLISI NRP. 67060253



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Padang, 10 April 2019

KAMPARAN

LOKASI	LOKASI	LUAS	BANGUNAN	LAPANGAN	PEKAWANGAN	JALAN	BUKTI	PERAKIBAH	PERAKIBAH	PERAKIBAH	PERAKIBAH	PERAKIBAH	PERAKIBAH	PERAKIBAH	PERAKIBAH	PERAKIBAH	PERAKIBAH	PERAKIBAH
		177.000	75.900	45.300	1.500	42.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300

DAFTAR : TANAH MILIK SIPN PADANG BESE

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

LAMPIRAN 20

DAERAH SUMATERA BARAT
 Negeri Padang Besi

DATA MATERIAL LOGISTIK
 SPN PADANG BESI
 BULAN MEI 2010

JENIS BARANG	KONDISI			JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
	BB	RR	RR			
2	3	4	5	6	7	8
RUANG						LUAS M ²
RUANG UTAMA		1		1	UNIT	1.190
RUANG BIBLIOTEK				1	UNIT	2.700
RUANG OLAH RAGA			1	1	UNIT	1.200
RUANG KANTOR / PENJAJARAN SPN		1			UNIT	35
SEK. SAMPULAN		1			UNIT	38
SEDERUNG		1		1	UNIT	8
SILO		1			UNIT	400
STAF KLINIK		1		1	UNIT	839
STAF KOLAHITK		1		1	UNIT	120
STAF KOMPI		4		4	UNIT	120
STAF KANTOR (30)		1		1	PENJU	132
STAF KEM. TYPE 130		1		1	PENJU	152
STAF KEM. TYPE 30	5	10		15	PENJU	450
STAF KEM. TYPE 45	5	3		8	PENJU	110
STAF KEM. TYPE 135		28		28	PENJU	2.475
STAF KEM. TYPE 170 BAKAL		40		40	PENJU	1.400
STAF KEM. TYPE 170		1		1	UNIT	1,8
STAF KEM. TYPE 170		2	1	3	UNIT	
STAF KEM. TYPE 170		2		2	UNIT	
STAF KEM. TYPE 170		9		9	UNIT	12.240
STAF KEM. TYPE 170		1		1	UNIT	714
STAF KEM. TYPE 170				1	UNIT	360
STAF KEM. TYPE 170		1		1	UNIT	100
STAF KEM. TYPE 170		2		2	UNIT	58
STAF KEM. TYPE 170		2		2	UNIT	650
STAF KEM. TYPE 170		1		1	UNIT	5.000
STAF KEM. TYPE 170		1		1	UNIT	5.000
STAF KEM. TYPE 170		1		1	UNIT	1.250
STAF KEM. TYPE 170		1		1	UNIT	1.500
STAF KEM. TYPE 170			1	1	UNIT	300
STAF KEM. TYPE 170		1		1	UNIT	3.000
STAF KEM. TYPE 170				1	UNIT	5.000
STAF KEM. TYPE 170				1	UNIT	
STAF KEM. TYPE 170		2		2	UNIT	
STAF KEM. TYPE 170				1	UNIT	
STAF KEM. TYPE 170		3		3	UNIT	
STAF KEM. TYPE 170		1		1	UNIT	500
STAF KEM. TYPE 170		1		1	1.500 M ²	
STAF KEM. TYPE 170				1	UNIT	
STAF KEM. TYPE 170				1	UNIT	16 M ²
STAF KEM. TYPE 170				1	UNIT	16 M ²
STAF KEM. TYPE 170				1	UNIT	80

LAMPIRAN 21

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN A
SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI
No. Pol. : SKEP/1018/ UU /1994
TANGGAL : 25 - 7 - 1994

PROGRAM PENDIDIKAN

NAMA PENDIDIKAN : Sekolah Bintara Prajurit Karier (PK)
Polri.

LAMA PENDIDIKAN : 11 Bulan

I. TUJUAN PENDIDIKAN :

A. Membentuk dan mengembangkan personil yang memenuhi syarat tertentu dan terpilih untuk menjadi Bintara Prajurit Karier Polri yang memiliki sikap dan perilaku sebagai Prajurit Polri yang berjiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta berkode Etik Polri.

B. Membekali ketrampilan dan pengetahuan teknis maupun taktis profesional Kepolisian agar mampu melaksanakan tugas Umum Kepolisian.

SASARAN PENDIDIKAN :

Bintara Tugas Umum Kepolisian.

MATERI AJARAN

A. PENTAHAPAN

1. Tahap Pertama adalah tahap Dasrit yaitu proses pendidikan yang menitik beratkan agar para peserta didik memperoleh kecakapan praktis dan ketrampilan dasar keprajuritan umum ABRI.

2. Tahap Das Gol adalah tahap pembekalan pengetahuan dan ketrampilan teknis maupun taktis profesional kepolisian agar mampu melaksanakan tugas sebagai Bintara tugas Umum Kepolisian.

3. Tahap Das Gol Lan adalah tahap pembekalan profesi agar para peserta didik memiliki kemampuan tugas umum Kepolisian.

LAMPIRAN ASURAT KEPUTUSAN KAPOLRINo. Pol. : SKEP/1018/VII/1994TANGGAL : 26-7-1994

4. Tahap Pembulatan Dik adalah tahap pembulatan pendidikan yang merupakan aplikasi teknik umum Kepolisian yang terdiri dari :

- a. Simulasi dan Latihan teknis di lingkungan Lemdik.
- b. Latihan kerja di Kesatuan Kewilayahan.

E. SUSUNAN MATERI AJARAN1. Pengantar Orientasi Pendidikan

- a. Waktu Pimpinan
- b. Test Awal Kesehatan
- c. Test Kesamaptaan Jasmani
- d. Pola Kurikulum dan Sistem Evaluasi
- e. Teknik Belajar/PUD
- f. Bintra Lemdik

2. Bidang Studi Dasrit SBS Bin Juang :

- a. Bin Rohani
- b. Bin Mental Ideologi
- c. Bin Tradisi Kejuangan
- d. Permildas
- e. Pengetahuan Teknik Tempur
- f. Pengetahuan Taktik Tempur
- g. Hukum Militer

SBS Binjas Mil

- a. Senam Militer
- b. Medan Tangkas
- c. Renang Militer X
- d. Perkelahian Militer
- e. Kesamaptaan Jasmani

SBS Lat Ganda

Latihan Berganda

Bidang Studi Das Gol

SBS Kepemimpinan dan Manajemen

- a. Kepemimpinan
- b. Manajemen
- c. Sospol ABRI

LAMPIRAN ASURAT KEPUTUSAN KAPOLRINo. Pol. : SKEP/1018/VI/1994TANGGAL : 25-7-1994SBS Pengenalan Organisasi dan Tugas ABRI/Polri

- a. Pengenalan Organisasi dan Tugas ABRI
- b. Pengenalan Organisasi dan Tugas Polri
- c. Kode Etik Kepolisian

Badang Studi Das Gol LanSBS Tugas Umum Kepolisian & Fungsi Teknis Sabhara

- a. Administrasi Sabhara
- b. Penjagaan
- c. Patroli
- d. Pengawasan
- e. Police Hazard + FKK + AF
- f. Laporan Polisi dan Berita Acara
- g. TFTKP
- h. Dalmas/FHH

SBS Fungsi Teknis Kepolisian Lainnya

- a. F.T. Intelpampol
- b. F.T. Lantas
- c. F.T. Reserse
- d. F.T. Binmas

SBS Hukum dan Per-UU-an

- a. Hukum Pidana
- b. Hukum Acara Pidana
- c. Tipiring
- d. Per-UU-an dan Peraturan lainnya

SBS Binjas Polri

- a. Beladiri
- b. Menembak
- c. Drill Borgol, Tongkat dan Lantas

SBS Pelengkap

- a. Interpersonal Skill
- b. Tata Krama
- c. Opstin dan Opssus

SBS Bantuan Teknis Kepolisian

- a. Siskomlek Polri
- b. Puskodalops/Sispullahjianta
- c. Mengetik dan Pengenalan Komputer
- d. Identifikasi/Dactiloscropy
- e. Laboratorium Forensic

LAMPIRAN ASURAT KEPUTUSAN KAPOLRINo. Pol. : SKEP/1018 / VII / 1994TANGGAL : 25 - 7 - 1994SES Pengetahuan Bahasa

- a. Bahasa Indonesia
- b. Bahasa Inggris

Pembulatan Pendidikan

- a. Latihan
- b. Ceramah dan Penataran

Lain-lainPERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK :

1. Warga Negara Indonesia Pria/Wanita dan ber-Agama.

2. Umur minimal 18 tahun dan maksimal 22 tahun disertai/dibuktikan dengan Akte Kelahiran atau Surat Kenal lahir dari Bupati atau Walikota.

3. Berkelakuan baik dan tidak kehilangan hak untuk menjadi anggota ABRI/Polri.

4. Berijazah serendah-rendahanya SLTA Negeri atau sederajat yang dipersamakan.

5. Berbadan Sehat yang dinyatakan oleh Dokter Panitia Penguji Kesehatan Polri.

6. Tinggi badan sekurang-kurangnya :

- a. 165 Cm bagi calon Bintara Polri Pria.
- b. 160 Cm bagi calon Bintara Polri Wanita.

7. Belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama dalam Pendidikan ditambah (2 dua) tahun setelah tamat Pendidikan.

8. Tidak terikat oleh sesuatu perjanjian ikatan Dinas dengan suatu instansi lain atau dapat menunjukkan surat izin dari Pimpinan/Perusahaan bagi mereka yang sudah bekerja.

9. Harus ada persetujuan dari Orang tua/Wali.



ASTROSEMITRO
KURUSMAN
PENSIDAR POLISI

Urutan Kepangkatan Polri dulu (Orde Lama dan Orde Baru)

Nama Pangkat	Singkatan	Simbol	Letak
--------------	-----------	--------	-------

PERWIRA TINGGI

Jenderal	Jend.		Pundak
Letnan Jenderal	Letjen		
Mayor Jenderal	Mayjen		
Brigadir Jenderal	Brigjen		

PERWIRA MENENGAH

Kolonel	Kol.		Pundak
Letnan Kolonel	Letkol		
Mayor	May.		

PERWIRA PERTAMA

Kapten	Kapt.		Pundak
Letnan Satu	Lettu		
Letnan Dua	Letda		

BINTARA TINGGI

Pembantu Letnan Satu	Peltu		Pundak
Pembantu Letnan Dua	Pelda		

BINTARA

Sersan Mayor	Serma		Lengan
Sersan Kepala	Serka		
Sersan Satu	Sertu		
Sersan Dua	Serda		

TAMTAMA

Kopral Kepala	Kopka		Lengan
Kopral Satu	Koptu		
Kopral Dua	Kopda		